

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEMISKINAN
DI JAWA TENGAH TAHUN 2004-2008**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas diponegoro

Disusun oleh:
ARI WIDIASTUTI
NIM. C2B006012

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ari Widiastuti

Nomor Induk Mahasiswa : C2B006012

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI JAWA
TENGAH TAHUN 2004-2008**

Dosen Pembimbing : Nenek Woyanti, SE, M.Si

Semarang, 16 September 2010

Dosen Pembimbing,



(Nenek Woyanti, SE, M.Si)

NIP. 19690512 199403 2003

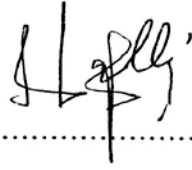
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Ari Widiastuti
Nomor Induk Mahasiswa : C2B006012
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI JAWA
TENGAH TAHUN 2004-2008**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 23 September 2010

Tim Penguji

1. Nenek Woyanti, SE., MSi.

(.....)

2. Drs. Maruto Umar Basuki, MSi

(.....)

3. Evi Yulia Purwanti, SE., MSi

(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ari Widiastuti, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2008”**. adalah tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan universitas batal saya terima.

Semarang, 16 September 2010

Yang membuat pernyataan



Ari Widiastuti

NIM. C2B006012

PERSEMBAHAN

*Teruntuk Alm. Ayahanda Tercinta
Ku Tahu Engkau Selalu Melihat dan Menjagaku
Doaku Takkan Terputus Untukmu
Selalu Menyayangimu.....*

ABSTRAC

High level of poverty in Central Java which is shown by the large of number of poor people, shows that the process of economic development have not been able to realize the people's welfare. To overcome the problem of poverty, need to analyze what factors that affect poverty. The purpose of this study is to analyzed the factors that affect poverty in Central Java during the period 2004-2008.

This study uses secondary data analysis tool data panel, which consists of data over period 2004-2008 times series and cross section data 35 districts of Central Java. One of the approaches used to estimate the regression model with panel data is use a Fixed Effect Model (FEM), namely by dummy variables in the equation or also called Least Square Dummy Variable (LSDV). Dummy region used in this model because of the different characteristic and resources of each region.

The results showed that the variables of economic growth and education has a negative and signifikan impact on poverty. Meanwhile, the variables of population and fiscal decentralization have positive and signifikan impact on poverty.

Keywords: poverty, economic growth, population, education, fiscal decentralization, Fixed Effect Model (FEM)

ABSTRAKSI

Masih tingginya tingkat kemiskinan di Jawa Tengah yang ditunjukkan oleh banyaknya jumlah penduduk miskin, menunjukkan proses pembangunan ekonomi yang belum bisa meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut, terlebih dahulu perlu dilakukan analisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah selama periode tahun 2004-2008.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat analisis panel data, yang terdiri dari data *times series* selama periode 2004-2008 dan data *cross section* 35 kabupaten/kota Jawa Tengah. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel adalah dengan menggunakan *fixed effect model* (FEM) yaitu dengan memasukkan variabel dummy dalam persamaan atau disebut juga dengan *Least Square Dummy Variabel* (LSDV). Dummy wilayah digunakan dalam model ini karena adanya perbedaan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, variabel jumlah penduduk dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Kata kunci: kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, pendidikan, desentralisasi fiskal, *Fixed Effect Model* (FEM).

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah AWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah*”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata S1 Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan, namun berkat doa, bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Dr. H. M. Chabachib, M.Si. Akt, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Ibu Nenek Woyanti, SE, M.Si selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, masukan-masukan dan saran yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Mulyo Hendarto, SE, M.Si selaku dosen wali yang banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi selama penulis menjalani studi di Fakultas Ekonomi UNDIP
4. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomi UNDIP, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Keluarga tersayang, alm.Bapak dan Ibu, Mbak Ika, Mas Fajar, adikku Pria, keponakan kecilku Kayla, dan seluruh keluarga besar atas doa, kasih sayang dan dorongan semangat sehingga saya termotivasi untuk melakukan yang terbaik bagi kalian semua.
6. Teman-teman GFC Nia, Arum, Dee-dee, Santi dan Ratna atas persahabatan yang kita miliki, canda-tawa, suka-duka, doa, dan semangat yang selama ini diberikan.

7. Teman-teman seperjuangan: Ishomudin, Dimas, Nia, Azizah, Atika, Desy, Manda, Yuki, Fajar, Claudio, Santi, dee-dee, Arum, Ratna, Bertha, Rodho dan teman-teman semuanya atas bantuan diskusi, semangat, dorongan dan doa yang selama ini diberikan.
8. Seluruh keluarga besar IESP '06, beruntung bertemu teman-teman seperti kalian. Empat tahun bersama takkan tergantikan.
9. Teman-teman KKN desa Kalikurmo terima kasih atas segala dukungan kalian semua.
10. Teman-teman SMP dan SMA Hesti, Tisti, Titik, Dewi, dll atas persahabatan yang kita miliki serta semangat dan doa yang diberikan.
11. Seseorang yang sangat berarti.
12. Para Staf dan Pegawai di Perpustakaan baik perpustakaan sirkulasi, referensi, maupun petugas TU, yang telah memberikan pelayanan dan bantuan kepada penulis selama berkuliah di FE Undip.
13. Terakhir untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan, Oleh karena itu, penulis tak lupa mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini.

Semarang, 16 September 2010

Penulis



Ari Widiastuti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAKSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
Bab II Tinjauan Pustaka.....	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Kemiskinan.....	14
2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan.....	23
2.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	23
2.1.2.2 Jumlah Penduduk.....	35
2.1.2.3 Pendidikan.....	37

2.1.2.4 Desentralisasi Fiskal.....	38
2.1.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian.....	41
2.2 Penelitian Terdahulu.....	46
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	57
2.4 Hipotesis Penelitian.....	58
Bab III Metode Penelitian.....	59
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	59
3.1.1 Variabel Penelitian.....	59
3.1.2 Definisi Operasional.....	60
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	63
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	65
3.4 Metode Analisis.....	65
3.4.1 Estimasi Model Regresi.....	66
3.4.2 Estimasi Model Regresi Dengan Data Panel.....	67
3.4.3 Uji Asumsi Klasik.....	69
3.4.4 Pengujian Statistik Analisis Regresi.....	72
Bab IV Hasil dan Pembahasan.....	77
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	77
4.1.1 Kondisi Kemiskinan di Jawa Tengah.....	77
4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah.....	80
4.1.3 Jumlah Penduduk di Jawa Tengah.....	82
4.1.4 Pendidikan di Jawa Tengah.....	84
4.1.5 Desentralisasi Fiskal di Jawa Tengah.....	86
4.2 Uji Asumsi Klasik.....	89
4.2.1 Uji Autokorelasi.....	89
4.2.2 Uji Heteroskedasitas.....	90
4.2.3 Uji Multikolinieritas.....	91

4.2.4 Uji Normalitas.....	92
4.3 Pengujian Statistik Analisis Regresi	93
4.3.1 Pengujian Koefisien Regresi (R^2).....	93
4.3.2 Pengujian Koefisien Regresi Secara Serentak (Uji F).....	95
4.3.3 Pengujian Koefisien Regresi Secara Individual (Uji t).....	95
4.4 Interpretasi Hasil.....	99
Bab V Penutup	104
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Keterbatasan.....	105
5.3 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	109

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa	
Tahun 2004-2008	4
Tabel 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah	
Tahun 2004-2008.....	5
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk	
Jawa Tengah Tahun 2004-2008.....	9
Tabel 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) Jawa Tengah Tahun 2004-2008.....	10
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	53
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Jawa Tengah	
Tahun 2004-2008.....	78
Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Jawa Tengah	
Tahun 2004-2008.....	81
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Jawa Tengah	
Tahun 2004-2008	83
Tabel 4.4 Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten/Kota Jawa Tengah	
Tahun 2004-2008.....	85
Tabel 4.5 Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota Jawa Tengah	
Tahun 2004-2008.....	88
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi.....	90
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedasitas	91
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas	92
Tabel 4.9 Hasil Regresi Model Persamaan Kemiskinan.....	93

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2008	7
Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan (<i>Vicious circle of poverty</i>).....	20
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Data	109
Lampiran B Hasil Regresi Utama	114
Lampiran C Hasil Uji Asumsi Klasik	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada masa ekonomi tradisional hanya diukur berdasarkan tingkat perumbuhan GNP, baik secara keseluruhan maupun per kapita. Dengan pertumbuhan GNP ini diyakini dengan sendirinya menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi lain yang pada akhirnya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lebih merata. Prinsip tersebut dikenal dengan *trickle down effect*. Sedangkan pandangan ekonomi baru menganggap tujuan utama pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan GNP semata, tapi juga pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Todaro,2000).

Kemiskinan sendiri merupakan masalah multi dimensi yang dihadapi hampir semua negara di dunia. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Mudrajad Kuncoro, 1997). Besarnya ukuran standar minimum tersebut relatif menurut pendekatan mana yang digunakan. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mendasarkan pada besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita/bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan (BPS, 1994). Kebutuhan minimum makanan menggunakan patokan 2.100 kalori/hari,

kebutuhan non makanan meliputi perumahan, sandang, aneka barang dan jasa. Sementara itu, UNDP dalam laporannya pada *Human Development Report* tahun 1997, memperkenalkan suatu indikator kemiskinan yang disebut *Human Development Indeks* (HDI). Kriteria yang digunakan sebagai tolok ukur kemiskinan antara lain: (1) kehidupan; (2) pendidikan dasar; (3) ketetapan ekonomi.

Pada tahun 2000 beberapa negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia menandatangani Deklarasi Milenium yang menunjukkan komitmen bangsa-bangsa tersebut untuk mencapai delapan sasaran pembangunan milenium (*Millenium Development Goals-MDGs*) dimana salah satu pointnya adalah pengentasan kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan pentingnya masalah kemiskinan untuk diatasi sehingga taraf kehidupan rakyat menjadi lebih berkualitas.

Di tingkat regional isu mengenai desentralisasi menjadi angin segar bagi pembangunan ekonomi regional. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia berlaku sejak 1 Januari 2001 yang ditandai dengan lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang "Pemerintah Daerah" dan UU No.25 tahun 1999 tentang "Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah". Dengan sistem desentralistik diharapkan daerah mampu mengelola potensi daerah masing-masing secara maksimal guna untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Sistem desentralisasi diyakini mampu mewujudkan pembangunan ekonomi regional yang lebih baik. Menurut UU No 32 tahun 2004, pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal daerah dituntut agar lebih mandiri. Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari derajat desentralisasi fiskal di masing-masing daerah. Daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerahnya dan juga diberi kewenangan untuk mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Dengan begitu anggaran daerah jadi lebih efektif, karena langsung diarahkan pada kebutuhan daerah bersangkutan.

Pembangunan ekonomi yang semenjak masa sentralistik terpusat di Pulau Jawa tidak melupakan Jawa dari masalah kemiskinan. Menurut Siregar dan Wahyuniarti (2008), jumlah penduduk miskin di Indonesia terpusat di Pulau Jawa, terutama di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Konsentrasi penduduk miskin di Pulau Jawa mencapai rata-rata 57,5 persen dari total penduduk miskin di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini hanya dinikmati oleh golongan masyarakat tertentu, tidak merata bagi seluruh golongan masyarakat.

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2004-2008 (ribu jiwa)**

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
2004	277,1	4.654,2	6.843,8	616,2	7.312,5	779,2
2005	316,2	5.137,6	6.533,5	625,8	7.139,9	830,5
2006	407,1	5.712,5	7.100,6	648,7	7.678,1	904,3
2007	405,7	5.457,9	6.557,2	633,5	7.155,3	886,2
2008	379,6	5.322,4	6.189,6	616,3	6.651,3	816,7

Sumber: BPS (2005-2009)

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Secara umum jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa mengalami peningkatan dari tahun 2004 sampai 2006, setelah itu tahun 2007 dan 2008 jumlah penduduk miskin semakin menurun. Kenaikkan pada tahun 2006 disebabkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 September 2005 yang menyebabkan kenaikan harga barang kebutuhan lainnya. Data di atas juga menunjukkan konsentrasi penduduk miskin di Pulau Jawa berada di provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Penduduk miskin terbanyak berada di provinsi Jawa Timur dengan rata-rata 7.178,4 ribu jiwa. Sementara yang terendah yaitu di provinsi DKI Jakarta sebesar 357,1 ribu jiwa. Rata-rata jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 6644,9 ribu jiwa, yang merupakan terbesar kedua setelah Jawa Timur.

Di Jawa Tengah sendiri kemiskinan di perdesaan lebih banyak daripada kemiskinan di perkotaan. Menurut BPS (2008) sekitar 58,70 persen penduduk miskin di Jawa Tengah berada di perdesaan. Berikut data jumlah dan persentase penduduk miskin Jawa Tengah tahun 2004-2008:

Tabel 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah Tahun 2004-2008

tahun	Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
-------	------------------------------------	--------------------------------

	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2004	2.346,5	4497,3	6.843,8	17,52	23,64	21,11
2005	2.671,2	3862,3	6.533,5	17,24	23,57	20,49
2006	2.958,1	4142,5	7.100,6	18,9	25,28	22,19
2007	2.687,3	3869,9	6.557,2	17,23	23,45	20,43
2008	2.556,5	3633,1	6.189,6	16,34	21,96	19,23
Rata-rata	2.643,92	4001,02	6.644,94	17,45	23,58	20,69

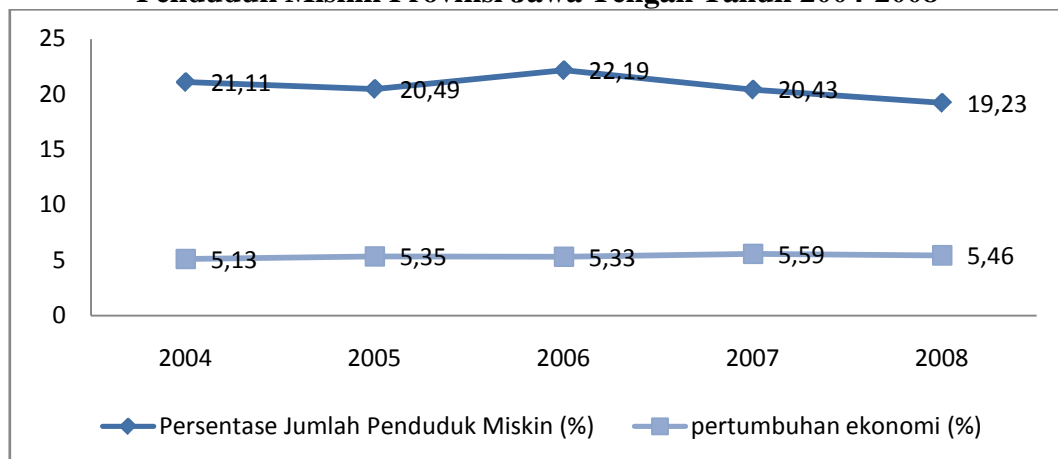
Sumber: BPS (2005-2009), diolah

Dari data pada tabel 1.2 terlihat bahwa secara umum kemiskinan di desa dan di kota mengalami trend kenaikan dan penurunan yang sama. Rata-rata persentase penduduk miskin di desa sebesar 23,58 persen, sedangkan di kota sebesar 17,45 persen. Dari tahun 2004-2005 penduduk miskin baik di kota maupun di desa mengalami penurunan. Tahun 2006 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin, karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 September 2005 yang kemudian memacu kenaikan harga-harga barang kebutuhan lainnya. Tahun 2007 dan 2008 jumlah penduduk miskin kembali mengalami penurunan.

Tingginya tingkat kemiskinan di Jawa Tengah membuat pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang efektif untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah antara lain (1) pertumbuhan ekonomi; (2) jumlah penduduk; (3) pendidikan, dan (4) desentralisasi fiskal yang berlaku sejak tahun 2001.

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempunyai keterkaitan yang erat. Terdapat pendapat bahwa pertumbuhan yang cepat berakibat buruk terhadap kaum miskin, karena mereka akan tergilas dan terpinggirkan oleh perubahan struktural pertumbuhan modern. Ada juga pendapat bahwa konsentrasi penuh untuk pengentasan kemiskinan akan memperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi, karena dana pemerintah akan habis untuk penanggulangan kemiskinan sehingga proses pertumbuhan ekonomi akan melambat (Todaro, 2000). Di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat berarti bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Menurut Siregar dan Wahyuniarti (2008), pertumbuhan ekonomi memang merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) untuk mengurangi kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (*growth with equity*).

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2008



Sumber: BPS (2005-2009), diolah.

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama tahun 2004-2008 menunjukkan trend yang cenderung stabil setiap tahunnya, sedangkan persentase jumlah penduduk miskin lebih fluktuatif. Dari gambar tersebut juga menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan penurunan persentase jumlah penduduk miskin. Dengan nilai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yaitu berkisar 5 persen, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah masih cukup tinggi, yaitu sekitar 20 persen dari jumlah penduduk.

Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi suatu wilayah. Kuantitas sumber daya manusia dapat dilihat dari jumlah penduduknya. Menurut Sadono Sukirno (1997), perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat pembangunan. Faktor pendorong karena, pertama, memungkinkan semakin banyaknya tenaga kerja. Kedua, perluasan pasar, karena luas pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting, yaitu pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Sedangkan penduduk disebut faktor penghambat pembangunan karena akan menurunkan produktivitas, dan akan terdapat banyak pengangguran. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, jumlah penduduk yang besar justru akan memperparah tingkat kemiskinan. Fakta menunjukkan, di kebanyakan Negara dengan jumlah penduduk yang besar tingkat kemiskinannya juga lebih besar jika dibandingkan dengan Negara dengan jumlah

penduduk sedikit. Banyak teori dan pendapat para ahli yang meyakini adanya hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan kemiskinan, salah satunya adalah Thomas Robert Malthus. Malthus meyakini jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan maka suatu saat nanti sumber daya alam akan habis. Sehingga muncul wabah penyakit, kelaparan dan berbagai macam penderitaan manusia.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Jawa Tengah Tahun 2004-2008

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	pertumbuhan Jumlah penduduk (%)
2004	32.397.431	-
2005	32.908.850	1,58
2006	32.177.730	-2,22
2007	32.380.279	0,63
2008	32.626.390	0,76

Sumber: BPS (2005-2009), diolah.

Tabel 1.3 menunjukkan jumlah penduduk dan pertumbuhannya dari tahun 2004 sampai dengan 2008. Dari data di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Jawa Tengah selalu mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2006 yang mengalami penurunan jumlah penduduk. Bila dilihat jumlah penduduk tiap tahunnya, terlihat

bahwa dalam lima tahun tersebut pertumbuhan jumlah penduduk Jawa Tengah cukup terkendali.

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Menurut Todaro pendekatan modal manusia (*human capital*) berfokus pada kemampuan tidak langsung untuk meningkatkan utilitas dengan meningkatkan pendapatan (Todaro, 2000). Dengan melakukan investasi pendidikan maka akan meningkatkan produktivitas, peningkatan produktivitas akan meningkatkan pendapatan, pendapatan yang cukup akan mampu mengangkat kehidupan seseorang dari kemiskinan.

**Tabel 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK)
Jawa Tengah Tahun 2004-2008 (%)**

Tahun	Angka Paartisipasi Kasar		
	SD	SMP	SMA
2004	108,14	85,21	52,69
2005	107,01	82,21	53,17
2006	111,00	82,11	54,54
2007	112,29	83,23	54,83
2008	109,76	82,29	56,98

Sumber: BPS (2005-2009), diolah.

Tabel 1.4 menunjukkan perkembangan indikator pendidikan provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2008. Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Dari data pada tabel 1.4 terlihat bahwa APK terbesar terjadi pada tingkat Sekolah Dasar (SD), sedangkan yang terendah pada

tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) APKnya masih tinggi berkisar angka 80-an, hal tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah yang menetapkan kebijakan wajib belajar sembilan tahun. Rendahnya APK di tingkat SMA menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang belum mampu mengakses pendidikan yang tinggi. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh seseorang, maka akan semakin tinggi pula kemampuan (*skill*) yang dimiliki.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yaitu sekitar 5 persen, jumlah penduduk yang besar, tingkat pendidikan tinggi yang masih rendah. Diduga merupakan faktor yang mempengaruhi masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah. Lebih lanjut penelitian ini akan membahas bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, pendidikan dan desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah merupakan yang terbesar kedua di Pulau Jawa setelah provinsi Jawa Timur. Rata-rata jumlah penduduk miskin selama periode 2004-2008 sebesar 20,69 persen. Hal tersebut menunjukkan masih tingginya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Sementara itu, kinerja ekonomi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37 persen. Kuantitas sumber daya manusia di Jawa Tengah cukup besar dengan rata-rata 32.498.136 jiwa, sedangkan rata-rata laju

pertumbuhan berkisar 1,30 persen. Tingkat pendidikan yang dilihat dari Angka Partisipasi Kasar sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA menunjukkan bahwa APK paling tinggi yaitu pada tingkat SD, sedangkan untuk tingkat SMP dan SMA jumlahnya jauh lebih sedikit. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi, sehingga kualitas sumber daya manusia masih rendah. Derajat desentralisasi fiskal bervariasi antar daerah yang menunjukkan kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan daerah dari sumber-sumber potensial serta mengalokasikan dana tersebut seefektif mungkin, terutama untuk pengeluaran yang bersifat *pro-poor*.

Masih tingginya tingkat kemiskinan di Jawa Tengah merupakan masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini. Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut sebelumnya perlu adanya analisis factor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah sehingga nantinya dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat. Dalam penelitian ini akan dibahas pengaruh faktor pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, pendidikan dan desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.
2. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.
3. Mengetahui pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

4. Mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai:

1. Referensi bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan otonomi daerah dan pengentasan kemiskinan.
2. Perbendaharaan kepustakaan ilmiah bagi mahasiswa khususnya mengenai otonomi daerah dan pengentasan kemiskinan.
3. Masukan bagi pengambil kebijakan dalam menetapkan kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan publik

1.4 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami secara lebih jelas, maka penulis membagi skripsi ini dalam lima bab sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, penjabaran tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka berisi tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka akan membentuk suatu kerangka pemiliran dan hipotesis penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data untuk mencapai tujuan penelitian.

4. BabIV Hasil dan Analisis

Bab ini berisi mengenai gambaran umum obyek penelitian. Selain itu bab ini juga akan menguraikan mengenai analisis data dengan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dan pembahasan mengenai hasil analisis obyek penelitian.

5. Bab V Penutup

Sebagai bab terakhir, bab ini akan menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dalam pembahasan, serta saran-saran bagi pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum fungsi dari teori yaitu: (1) menjelaskan (*explanation*) ruang lingkup variabel-variabel yang akan diteliti; (2) meramalkan (*prediction*), yaitu menyusun hipotesis dan instrumen penelitian; (3) pengendalian (*control*), yaitu membahas hasil penelitian dan memberikan saran (Sugiyono, 2005). Pada landasan teori ini akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan judul penelitian antara lain mengenai kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan factor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin.

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Rendahnya tingkat kehidupan yang sering sebagai alat ukur kemiskinan hanyalah merupakan salah satu mata rantai dari munculnya lingkaran kemiskinan. Kemiskinan bisa dipandang sebagai suatu hal yang absolut dan juga relatif. Banyak tokoh, peneliti, badan resmi pemerintah, dan Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) yang mempunyai pendapat tersendiri dalam memandang masalah kemiskinan ini.

2.1.1.1 Definisi Kemiskinan

Ada banyak definisi dan konsep tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendasarkan pada besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita/bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan (BPS, 1994). Kebutuhan minimum makanan menggunakan patokan 2.100 kalori/hari, kebutuhan non makanan meliputi perumahan, sandang, aneka barang dan jasa. Pengeluaran bukan makanan ini dibedakan antara perkotaan dan pedesaan. Pola ini telah dianut secara konsisten oleh BPS sejak tahun 1976.

Menurut Prof. Sujogyo kemiskinan didasarkan atas harga beras, yaitu tingkat konsumsi perkapita setahun yang sama dengan beras. Konsumsi beras untuk perkotaan dan pedesaan masing masing ditentukan sebesar 360 kg dan 240 kg per kapita per tahun (BPS, 1994)

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain: (1) terpenuhinya kebutuhan pangan; (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya

alam dan lingkungan; (3) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan; (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik (Bappenas, 2004)

Kemiskinan menurut Kantor Menteri Negara Kependudukan/ BKKBN adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya.

2.1.1.2 Penyebab Kemiskinan

Ditinjau dari sumber penyebabnya, kemiskinan dapat dibagi menjadi kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Kemiskinan kultural biasanya dicirikan oleh sikap individu atau kelompok masyarakat yang merasa tidak miskin meskipun jika diukur berdasarkan garis kemiskinan termasuk kelompok miskin. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur masyarakat yang timpang, baik karena perbedaan kepemilikan, kemampuan, pendapatan dan kesempatan kerja yang tidak seimbang maupun karena distribusi pembangunan dan hasilnya yang tidak merata. Kemiskinan struktural biasanya dicirikan oleh struktur masyarakat yang timpang terutama dilihat dari ukuran-ukuran ekonomi.

Kemiskinan memang merupakan masalah multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Kondisi kemiskinan setidaknya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: Pertama, rendahnya taraf pendidikan dan kesehatan

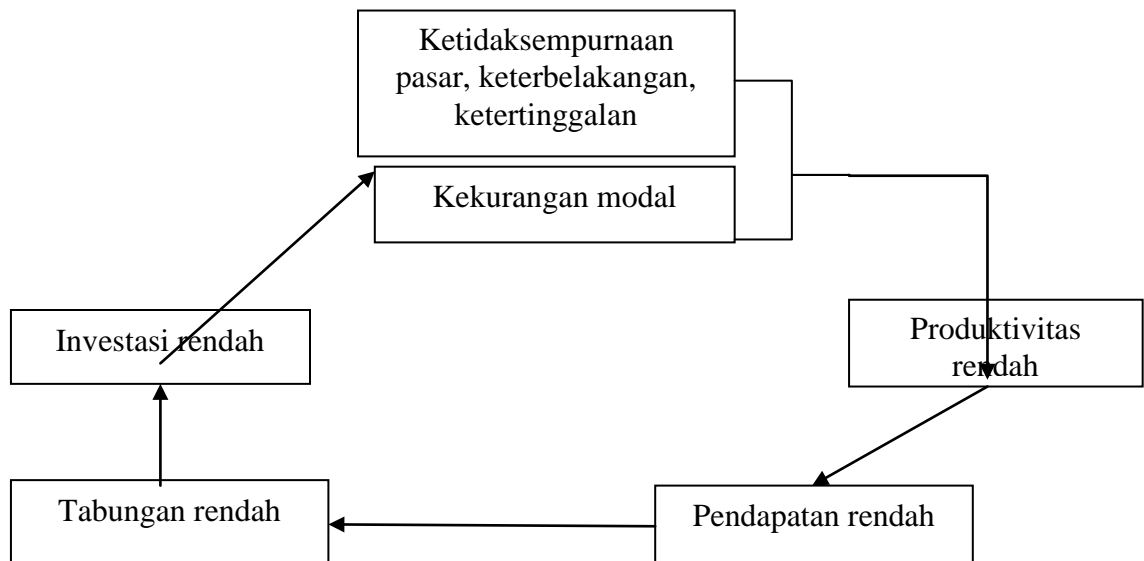
berdampak pada keterbatasan dalam pengembangan diri dan mobilitas. Hal ini berpengaruh terhadap daya kompetisi dalam merebut atau memasuki dunia kerja. Kedua, rendahnya derajat kesehatan dan gizi berdampak pada rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan selanjutnya akan mengurangi inisiatif. Ketiga, terbatasnya lapangan pekerjaan semakin memperburuk kemiskinan. Dengan bekerja setidaknya membuka kesempatan untuk mengubah nasibnya. Keempat, kondisi terisolasi (terpencil) mengakibatkan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain tidak dapat menjangkanya. Kelima, ketidak stabilan politik berdampak pada ketidak berhasilan kebijakan pro-poor. Berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan akan mengalami kesulitan dalam implementasi jika tidak didukung oleh kondisi politik yang stabil.

2.1.1.3 Teori Kemiskinan

Sharp, et al (1996) dalam Mudrajat Kuncoro (1997) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumberdaya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circle of poverty*). Teori ini ditemukan oleh Ragnar Nurkse (1953), yang mengatakan: "a poor country is poor because it is poor "(Negara miskin itu miskin karena dia miskin). Adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkat kemiskinan ini (Mudrajad Kuncoro, 1997). Berikut gambar lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circle of poverty*)

Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious circle of poverty*)



Sumber: Nurkse dalam Mudrajad Kuncoro (1997)

Menurut Thorbecke, kemiskinan dapat lebih cepat tumbuh di perkotaan dibandingkan dengan pedesaan karena, *pertama*, krisis cenderung memberi pengaruh terburuk kepada beberapa sektor ekonomi utama di wilayah perkotaan, seperti konstruksi, perdagangan dan perbankan yang membawa dampak negatif terhadap pengangguran di perkotaan; *kedua*, penduduk pedesaan dapat memenuhi tingkat subsistensi dari produksi mereka sendiri. Hasil studi atas 100 desa yang dilakukan oleh SMERU Research Institute memperlihatkan bahwa pertumbuhan belum tentu dapat menanggulangi kemiskinan, namun perlu pertumbuhan yang keberlanjutan dan distribusi yang lebih merata serta kemudahan akses bagi rakyat miskin.

2.1.1.4 Ukuran Kemiskinan

Pada umumnya terdapat dua indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Mengukur kemiskinan dengan mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedangkan konsep kemiskinan yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif (Tambunan, 2001).

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan ketidak mampuan seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup setiap hari. Kebutuhan minimum tersebut diterjemahkan dalam ukuran finansial (uang). Nilai minimum tersebut digunakan sebagai batas garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil,

sehingga dapat ditelusuri kemajuan yang diperoleh dalam menanggulangi kemiskinan pada level absolut sepanjang waktu.

World bank menggunakan ukuran kemiskinan absolut ini untuk menentukan jumlah penduduk miskin. Menurut world bank, penduduk miskin adalah mereka yang hidup kurang dari US\$1 per hari dalam dolar PPP (*Purchasing Power Parity*). Akan tetapi, tidak semua negara mengikuti standar minimum yang digunakan world bank tersebut, karena bagi negara-negara berkembang level tersebut masihlah tinggi, oleh karena itu banyak negara menentukan garis kemiskinan nasional sendiri dimana kriteria yang digunakan disesuaikan dengan kondisi perekonomian masing-masing negara.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menentukan kemiskinan absolut Indonesia merupakan ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum energi kalori (2.100 kilo kalori per kapita per hari) yang dipergunakan tubuh dan kebutuhan dasar minimum untuk sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan dasar lain.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subyektif. Mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Kemiskinan relatif ini digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan.

Badan pemerintah yang menggunakan ukuran kemiskinan relatif misalnya BKKBN. BKKBN mendefinisikan miskin atau kurang sejahtera dalam pengertian Pembangunan Keluarga Sejahtera yang terdiri atas keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Keluarga pra sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan keluarga berencana. Sedangkan keluarga sejahtera I adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis, serta kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

2.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output nasional suatu periode tertentu terhadap periode sebelumnya. Dalam perkembangannya terdapat banyak teori mengenai pertumbuhan ekonomi, antara lain: teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan neoklasik, teori pertumbuhan endogen, dan teori pertumbuhan Kuznet.

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan awal abad 19-an, yaitu di masa revolusi Industri, dimana suasana waktu itu merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi klasik

dikembangkan oleh penganut aliran klasik yaitu Adam Smith dan David Ricardo.

a. Adam Smith

Orang pertama yang membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis adalah Adam Smith (1723-1790). Dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* (1776) ia mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. Menurut Smith terdapat dua aspek utama pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (Lincoln Arsyad, 1997)

Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Smith ada tiga, yaitu:

- a. Sumber daya alam yang tersedia (atau faktor produksi tanah)
- b. Sumber daya insani (atau jumlah penduduk)
- c. Stok barang modal yang ada

Menurut Adam Smith dalam Suparmoko (1992), untuk berlangsungnya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Spesialisasi dalam proses produksi akan dapat meningkatkan ketrampilan tenaga kerja, dapat mendorong ditemukannya alat-alat atau mesin-mesin baru dan akhirnya dapat mempercepat dan meningkatkan produksi. Dinyatakan bahwa sebelum adanya pembagian kerja harus ada akumulasi kapital terlebih dahulu dimana

skumulasi kapital ini berasal dari dana tabungan. Di samping itu Smith juga menitik beratkan pada "luas pasar". Pasar harus seluas mungkin agar dapat menampung hasil produksi, sehingga perdagangan internasional menarik perhatiannya karena hubungan perdagangan internasional ini menambah luasnya pasar, sehingga pasar akan terdiri dari pasar dalam negeri dan pasar luar negeri.

Menurut Smith, sekali pertumbuhan ini mulai maka ia akan bersifat komulatif, artinya bila ada pasar yang cukup dan ada akumulasi kapital, pembagian kerja akan terjadi dan ini akan menaikkan tingkat produktivitas tenaga kerja. Kenaikan produktivitas ini akan menaikkan penghasilan nasional dan selanjutnya juga memperbesar jumlah penduduk. Penduduk tidak saja merupakan pasar karena pendapatannya naik, tetapi pendapatan yang lebih besar itu juga akan merupakan sumber tabungan. Jadi, spesialisasi yang semakin besar membutuhkan pasar yang semakin luas dan dorongan untuk membuat alat-alat baru makin bertambah. Di lain pihak, naiknya produktivitas akan mengakibatkan tingkat upah naik dan ada akumulasi kapital. Tetapi karena sumber daya alam terbatas adanya, maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perkembangan mengalami kemacetan atau berhenti.

b. David Ricardo

Jika Adam Smith dianggap sebagai pakar utama dan pelopor pemikiran ekonomi mahzab klasik, maka Ricardo menjadi pemikir yang paling menonjol diantara para pakar mahzab tersebut. Teori Ricardo dikemukakan pertama kali dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation* yang diterbitkan pada tahun 1917 (Lincoln Arsyad, 1997).

Perangkat teori yang dikembangkan Ricardo menyangkut empat kelompok permasalahan, yaitu:

1. Teori tentang nilai dan harga barang
2. Teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan dalam bentuk teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan laba.
3. Teori tentang perdagangan internasional
4. Teori tentang akumulasi dan pertumbuhan ekonomi

Menurut Lincoln Arsyad (1997), garis besar proses pertumbuhan ekonomi dan kesimpulan-kesimpulan dari Ricardo tidak jauh berbeda dengan teori Adam Smith yaitu mengacu pada laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output. Selain itu Ricardo juga menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (sumberdaya alam) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat.

Ciri-ciri perekonomian menurut Ricardo yaitu:

1. Jumlah tanah terbatas
2. Tenaga kerja (penduduk) meningkat atau menurun tergantung pada apakah tingkat upah berada di atas atau di bawah tingkat upah minimal (tingkat upah alamiah)
3. Akumulasi modal terjadi bila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal berada di atas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi.
4. Kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu
5. Sektor pertanian dominan

Dengan terbatasnya luas tanah, maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) akan menurunkan produk marginal (*marginal product*) yang kita kenal dengan istilah *The law of diminishing return*. Selama buruh yang dipekerjakan pada tanah tersebut bisa menerima tingkat upah di atas tingkat upah alamiah, maka penduduk (tenaga kerja) akan terus bertambah, dan hal ini akan menurunkan lagi produk marginal tenaga kerja dan pada gilirannya akan menekan tingkat upah ke bawah. Proses ini akan berhenti jika tingkat upah turun sampai tingkat upah alamiah. Jika tingkat upah turun sampai di bawah tingkat upah alamiah, maka jumlah penduduk (tenaga kerja) menurun. Kemudian tingkat upah akan naik lagi sampai tingkat upah alamiah. Pada posisi ini jumlah penduduk konstan. Jadi, dari segi faktor produksi tanah dan

tenaga kerja, ada suatu kekuatan dinamis yang selalu menarik perekonomian ke arah tingkat upah minimum, yaitu bekerjanya *the law of diminishing return*. Peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi adalah cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja, artinya dapat memperlambat bekerjanya *the law of diminishing return* yang pada gilirannya akan memperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal (Lincoln Arsyad, 1997).

2. Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori Pertumbuhan ekonomi Neoklasik berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan klasik. Model pertumbuhan neoklasik Solow merupakan pilar yang sangat mewarnai teori pertumbuhan neoklasik sehingga Robert Solow dianugerahi hadiah nobel bidang ekonomi pada tahun 1987. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan kemajuan tingkat teknologi. Berdasarkan penelitiannya, Solow mengatakan bahwa peran dari kemajuan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi adalah sangat tinggi (Lincoln Arsyad, 1997).

Menurut Todaro (2000), teori pertumbuhan neoklasik menegaskan bahwa kondisi keterbelakangan negara-negara berkembang bersumber dari buruknya keseluruhan alokasi sumberdaya yang selama ini bertumpu pada kebijakan-kebijakan pengaturan harga yang tidak tepat dan adanya campur

tangan pemerintah yang berlebihan. Model pertumbuhan neoklasik Solow berpegang pada konsep skala hasil yang terus berkurang (*diminishing return*) dari input tenaga kerja dan modal jika keduanya dianalisis secara terpisah, sedangkan jika keduanya dianalisis secara bersamaan atau sekaligus, Solow memakai asumsi skala hasil tetap (*constant return to scale*). Kemajuan teknologi ditetapkan sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dan tinggi rendahnya pertumbuhan itu sendiri oleh Solow maupun para teoresiti lainnya diasumsikan bersifat eksogen, atau selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Model pertumbuhan neoklasik Solow ini menggunakan fungsi produksi agregat standar, yakni:

$$Y = Ae^{\mu t} K^{\alpha} L^{1-\alpha} \quad (2.1)$$

Dalam persamaan tersebut, Y adalah produk domestik bruto, K adalah stok modal fisik dan modal manusia, L adalah tenaga kerja terampil, A adalah konstanta yang merefleksikan tingkat teknologi dasar, sedangkan $e^{\mu t}$ melambangkan konstanta tingkat kemajuan teknologi. Simbol α melambangkan elastisitas output terhadap modal (atau prosentase kenaikan GDP yang bersumber dari 1 persen penambahan modal fisik dan modal manusia). Hal ini biasanya dihitung secara statistik sebagai pangsa modal dalam total pendapatan nasional suatu negara. Karena α diasumsikan kurang dari 1 dan modal swasta diasumsikan dibayar berdasarkan produk marjinalnya sehingga tidak ada ekonomi eksternal, maka formulasi teori pertumbuhan

neoklasik ini memunculkan skala hasil modal dan tenaga kerja yang terus berkurang (*diminishing return*).

Menurut model pertumbuhan ini, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari satu atau lebih dari tiga faktor yaitu kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi), serta penyempurnaan teknologi. Lebih lanjut dikemukakan bahwa perekonomian tertutup (*closed economy*), yakni yang tidak menjalin hubungan dengan pihak luar, yang tingkat tabungan rendah, maka *ceteris paribus* perekonomian itu dalam jangka pendek pasti mengalami laju pertumbuhan lebih lambat apabila dibandingkan dengan perekonomian lainnya yang memiliki tingkat tabungan yang lebih tinggi. Pada akhirnya hal ini akan mengakibatkan konvergensi penurunan pendapatan per kapita. Di lain pihak, perekonomian terbuka (*open economy*), yakni yang mengandalkan hubungan perdagangan dengan pihak lain pasti akan mengalami konvergensi peningkatan pendapatan per kapita, karena arus permodalan akan mengalir deras dari negara-negara kaya ke negara-negara miskin dimana rasio modal-tenaga kerjanya masih rendah sehingga menjajikan imbalan atau tingkat keuntungan investasi yang lebih tinggi (Todaro, 2000)

3. Teori Pertumbuhan Endogen

Menurut Todaro (2000), teori pertumbuhan endogen (*endogenous growth theory*) atau secara lebih sederhana disebut dengan teori pertumbuhan

baru (*new growth theory*), menyajikan suatu kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan endogen atau proses pertumbuhan GNP yang bersumber dari suatu sistem yang mengatur proses produksi. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan GNP itu sebenarnya merupakan suatu konsekuensi alamiah atas adanya ekuilibrium jangka panjang.

Model pertumbuhan endogen menolak asumsi penyusutan imbalan marginal atas investasi modal (*diminishing marginal returns to capital investment*) dan menyatakan bahwa hasil investasi justru akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar. Dengan mengamsusikan bahwa investasi swasta dan publik (pemerintah) di bidang sumber daya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternalitas positif) dan memacu peningkatan produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan alamiah penurunan skala hasil, model pertumbuhan endogen ini mencoba menjelaskan terjadinya divergensi pola pertumbuhan ekonomi antar negara dalam jangka panjang (Todaro, 2000).

Todaro (2000) mengemukakan persamaan sederhana yang dapat ditarik dari teori pertumbuhan endogen yakni:

$$Y = AK \quad (2.2)$$

Dalam rumusan ini, A mewakili setiap faktor yang mempengaruhi teknologi, sedangkan K melambangkan modal fisik dan modal manusia. Rumusan tersebut menekankan adanya kemungkinan bahwa investasi dalam modal fisik dan modal manusia akan dapat menciptakan ekonomi eksternal

dan peningkatan produktivitas yang memelampaui keuntungan pihak swasta yang melakukan investasi itu, dan kelebihanannya cukup untuk mengimbangi penurunan skala hasil. Selanjutnya, hal tersebut akan menciptakan peluang-peluang investasi baru sehingga hasil akhirnya adalah peningkatan skala hasil yang mampu menciptakan proses pembangunan yang berkesinambungan (*sustained development*) dalam jangka panjang.

Melalui model pertumbuhan endogen dapat diketahui bahwa potensi keuntungan investasi yang tinggi di negara-negara berkembang yang rasio modal-tenaga kerjanya masih rendah, ternyata terkikis oleh rendahnya tingkat investasi komplementer (*complementary investment*) dalam modal atau sumber daya manusia (terutama melalui pengembangan fasilitas dan lembaga pendidikan), sarana-sarana infrastruktur, serta aneka kegiatan penelitian dan pengembangan.

Mengingat investasi komplementer akan menghasilkan manfaat personal maupun sosial, maka pemerintah berpeluang memperbaiki efisiensi alokasi sumber daya domestik dengan cara menyediakan berbagai macam barang publik atau aktif mendorong investasi swasta dalam industri padat teknologi dimana sumber daya manusia diakumulasikan selanjutnya. Model pertumbuhan endogen melihat perubahan teknologi sebagai hasil endogen dari investasi dalam sumber daya manusia dan industri-industri padat teknologi, baik yang dilakukan pihak swasta maupun pemerintah. Dengan demikian, model ini menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam

pengelolaan perekonomian nasional demi mempromosikan pembangunan ekonomi melalui investasi langsung dan tidak langsung dalam pembentukan modal manusia dan mendorong investasi swasta asing dalam industri padat teknologi (Todaro, 2000).

4. Teori Pertumbuhan Kuznet

Simon Kuznets menghitung dan menganalisis sejarah pertumbuhan ekonomi pada negara maju dalam jangka panjang. Pertumbuhan kapasitas produksi didasarkan pada perkembangan teknologi, pembangunan institusi/kelembagaan, sikap dan ideologi.

Terdapat enam karakteristik yang ditemui pada hampir semua negara maju, yaitu: (1) Pertumbuhan output per kapita yang tinggi; (2) kenaikan tingkat produktivitas faktor produksi yang tinggi; (3) transformasi struktur ekonomi yang cepat; (4) tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi; (5) terdapat kecenderungan negara maju untuk memperluas pasar dan sumber bahan baku pada negara lain (penetrasi ekonomi); (6) penyebaran pertumbuhan ekonomi yang terbatas, hanya mencapai sekitar 1/3 penduduk dunia.

Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu Negara sebagai “peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya; pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideology yang

dibutuhkannya.” Ketiga komponen pokok dari definisi ini sangat penting artinya:

1. Kenaikan output nasional secara terus menerus merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk menyediakan berbagai macam barang ekonomi merupakan tanda kematangan ekonomi.
2. Kemajuan teknologi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, namun belum merupakan syarat yang cukup. Untuk merealisasi potensi pertumbuhan yang terkandung dalam teknologi baru, maka
3. Penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideology harus dilakukan. Inovasi teknologi tanpa disertai inovasi social ibarat bola lampu tanpa aliran listrik.

2.1.2.2 Jumlah Penduduk

Menurut Sadono Sukirno (1997), perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat pembangunan. Faktor pendorong karena, pertama, memungkinkan semakin banyaknya tenaga kerja. Kedua, perluasan pasar, karena luas pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting, yaitu pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Sedangkan penduduk disebut faktor penghambat pembangunan karena akan menurunkan produktivitas, dan akan terdapat banyak pengangguran. Negara sedang berkembang kebanyakan mengalami dengan

laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, fakta menunjukkan tiga per empat penduduk dunia tinggal di Negara-negara sedang berkembang. Masalah kependudukan yang dihadapi yaitu tingginya tingkat kelahiran dan tinggi pula angka kematiannya, akan tetapi masih besar angka kelahirannya. Kelahiran yang tinggi salah satunya disebabkan oleh usia pernikahan yang masih dini, dan kurangnya pengetahuan akan KB. Sementara itu angka kematian yang tinggi disebabkan oleh masih rendahnya kualitas kesehatan yang dimiliki penduduk Negara sedang berkembang.

Konsep yang populer mengenai ekonomi demografi yaitu konsep transisi demografi. Pada dasarnya konsep ini mencoba menerangkan mengapa hampir semua Negara yang kini tergolong sebagai Negara maju sama-sama telah melewati sejarah populasi modern yang terdiri dari tiga tahapan besar. Tahap pertama, yaitu masa sebelum modernisasi dimana Negara-negara tersebut memiliki laju pertumbuhan penduduk yang stabil atau sangat lambat. Hal ini disebabkan karena tingginya angka kelahiran dan angka kematian. Tahap kedua, berlangsung setelah adanya modernisasi yang kemudian menghasilkan berbagai metode penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih baik, makanan yang lebih bergizi, pendapatan yang lebih tinggi, dan perbaikan kualitas hidup lainnya, sehingga secara bertahap-lahan usia harapan hidup menjadi lebih lama. Akan tetapi penurunan angka kematian tersebut tidak segera diimbangi oleh turunnya angka kelahiran, sehingga pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang tajam. Tahapan kedua ini menjadi awal dari proses transisi demografi, yaitu dari keadaan stabil atau laju pertumbuhan penduduk yang lambat ke laju pertumbuhan yang terus meningkat dengan cepat, sebelum pada akhirnya

kembali ke laju pertumbuhan yang menurun. Terakhir, tahapan ketiga segera berlangsung dengan munculnya berbagai macam dorongan dan pengaruh upaya-upaya modernisasi pembangunan yang menyebabkan turunnya tingkat kelahiran. Pada akhirnya tingkat kelahiran berhasil turun tajam sampai sama rendahnya dengan angka kematian, sehingga secara netto laju pertumbuhan penduduk menjadi sangat rendah atau bahkan nol.

2.1.2.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (human capital) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pendekatan modal manusia berfokus pada kemampuan tidak langsung untuk meningkatkan utilitas dengan meningkatkan pendapatan. Investasi dalam modal manusia akan terlihat lebih tinggi manfaatnya apabila kita bandingkan antara total biaya pendidikan yang dikeluarkan selama menjalani pendidikan terhadap pendapatan yang nantinya akan diperoleh ketika mereka sudah siap bekerja. Orang-orang yang berpendidikan tinggi akan memulai kerja penuh waktunya pada usia yang lebih tua, namun pendapatan mereka akan cepat naik daripada orang yang bekerja lebih awal.

Penduduk dengan pendapatan kecil seringkali mengalami *trade-off* dalam menentukan keputusan melanjutkan sekolah, melanjutkan ke tingkat lebih tinggi atau tidak. Bagi yang memilih melanjutkan ke tingkat lebih tinggi akan mengorbankan beberapa tahun pendapatan yang tidak diperolehnya karena bersekolah. Hal ini adalah biaya tidak langsung. Selain itu ada juga biaya langsung seperti biaya sekolah, buku-buku dan pengeluaran lain selama menempuh pendidikan. Hasil yang akan diperoleh

yaitu tingkat pendapatan yang nantinya akan diperoleh atas pendidikan yang dimiliki akan jauh lebih tinggi daripada ia tidak melanjutkan sekolah.

2.1.2.4 Desentralisasi Fiskal

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ditandai dengan diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 tentang "Pemerintah Daerah" dan UU No 25 tahun 1999 tentang "Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah" yang kemudian keduanya disempurnakan menjadi UU No32 tahun 2004 dan UU No33 tahun 2004. Menurut UU No 32/2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods/public service*) (Yuwono Prawirasetoto, 2002).

Dalam kaitannya dengan penyediaan barang publik, Oates (1990) dalam Jiwa Sarana (2005) memberikan gambaran sisi positif dari manfaat desentralisasi fiskal. Pertama, desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan efisiensi ekonomi dalam penyediaan barang publik. Kedua, desentralisasi fiskal akan menghasilkan pemerintah daerah yang "*experimentation and innovation*" dalam memproduksi barang publik. Ketiga, desentralisasi fiskal akan membawa kepada tingkat efisiensi output publik yang lebih baik, karena adanya keputusan-keputusan pengeluaran yang hati-hati yang didasarkan pada sumber biaya yang sebenarnya.

Otonomi daerah yang berjalan di Indonesia menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi seluas-luasnya berarti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan sesuai dengan undang-undang. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, dimana salah satu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup bagi daerah. Oleh karena itu otonomi daerah di Indonesia menganut prinsip "*money follows function*".

Terdapat dua variabel umum yang sering digunakan untuk mengukur desentralisasi fiskal di suatu wilayah, yaitu penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah. Ebel dan Yilmaz (2002) mengemukakan bahwa terdapat variasi dalam pemilihan indikator untuk mengukur desentralisasi negara yang satu dengan yang lain. Meskipun sama-sama menggunakan variabel penerimaan dan atau pengeluaran pemerintah, yang menjadi pembeda adalah variabel ukuran (*size variable*) yang digunakan oleh peneliti yang satu dengan peneliti lain. Ada tiga *size variable* yang umum digunakan, yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah dan GDP. Meskipun begitu, menurut Ebel dan Yilmaz (2002) baik penerimaan atau pengeluaran pemerintah bukanlah indikator yang sempurna untuk mengukur desentralisasi fiskal

Indikator pengeluaran diperoleh dari rasio pengeluaran daerah terhadap pengeluaran pemerintah pusat. Hal tersebut menunjukkan pertanggung jawaban daerah dalam administrasi dan pengeluaran publik. Sedangkan indikator penerimaan diperoleh dari rasio penerimaan daerah terhadap penerimaan pemerintah pusat. Hal tersebut menunjukkan kekuatan pemerintah daerah dalam mendanai penyediaan barang publik (Boex et al, 2005).

2.1.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

Hubungan antar variabel menunjukkan keterkaitan antara variabel independen dengan variabel dependen secara teoritis dan mengacu pada penelitian sebelumnya. Disini akan dibahas hubungan antara variabel independen, yaitu kemiskinan dengan lima variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, jumlah penduduk, pendidikan dan desentralisasi fiskal.

2.1.3.1 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Pembangunan merupakan suatu proses yang multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa pengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro, 2000).

Permasalahan kemiskinan tidak dapat dipecahkan hanya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata dengan mengharapkan terjadinya efek menetes ke bawah (*trickle down effect*). Menurut Siregar dan Wahyuniarti (2008), pertumbuhan ekonomi memang merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) untuk mengurangi kemiskinan. Adapun

syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (*growth with equity*). Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sector-sector dimana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Sedangkan secara tidak langsung, hal ini berarti diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusi manfaat pertumbuhan yang boleh jadi didapatkan dari sektor modern seperti jasa dan manufaktur yang padat modal.

Banyak penelitian yang membuktikan adanya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan yang negative antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah penduduk miskin, artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Sasana (2009), juga menghasilkan hal yang sama dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam usaha pengentasan kemiskinan dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.

2.1.3.2 Hubungan Antara Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan

Menurut Sadono Sukirno (1997), perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat pembangunan. Faktor pendorong karena, pertama, memungkinkan semakin banyaknya tenaga kerja. Kedua, perluasan pasar, karena luas pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting, yaitu pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Sedangkan penduduk disebut faktor penghambat pembangunan karena akan menurunkan produktivitas, dan akan terdapat banyak pengangguran.

Dalam kaitannya dengan kemiskinan, jumlah penduduk yang besar justru akan memperparah tingkat kemiskinan. Fakta menunjukkan, di kebanyakan Negara dengan jumlah penduduk yang besar tingkat kemiskinannya juga lebih besar jika dibandingkan dengan Negara dengan jumlah penduduk sedikit. Banyak teori dan pendapat para ahli yang meyakini adanya hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan kemiskinan. Salah satunya adalah Thomas Robert Malthus. Malthus meyakini jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan maka suatu saat nanti sumber daya alam akan habis. Sehingga muncul wabah penyakit, kelaparan dan berbagai macam penderitaan manusia.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Wahyuniarti (2008), semakin banyak jumlah penduduk maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Hal tersebut membuktikan bahwa jumlah penduduk yang

besar akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya untuk mengendalikan jumlah penduduk, seperti dengan melakukan program Keluarga Berencana (KB).

2.1.3.3 Hubungan Antara Pendidikan terhadap Kemiskinan

Pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan sebuah Negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2000). Mankiew (2000) menyebutkan, seseorang yang berpendidikan tinggi dapat menghasilkan gagasan baru tentang bagaimana pilihan terbaik untuk memproduksi barang dan jasa. Jika gagasan ini dapat diterima oleh penduduk luas, maka semua orang dapat menggunakannya sehingga gagasan tersebut dapat dikatakan sebagai manfaat eksternal dari pendidikan. Dalam hal ini, tingkat pengembalian pendidikan yang diterima oleh penduduk lebih besar dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang diterima oleh individu.

Jika dikaitkan dengan kualitas tenaga kerja, semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktifitas ini akan meningkatkan pendapatan baik pendapatan individu tersebut, maupun pendapatan nasional. Peningkatan pendapatan individu akan meningkatkan

kemampuan konsumsi mereka, sehingga dapat mengangkat kehidupan mereka dari kemiskinan. Oleh karena itu, investasi pendidikan akan berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan, sebagaimana yang telah dibuktikan pada penelitian Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008).

2.1.3.4 Hubungan Antara Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan di bidang fiskal yang meliputi kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintah, dan menentukan alokasi belanja. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Untuk mengukur derajat desentralisasi di suatu wilayah dapat melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran.

Banyak hasil penelitian yang membuktikan adanya hubungan antara derajat desentralisasi fiskal di suatu wilayah dengan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Shikra (2006) dalam penelitiannya yang berjudul "*Fiskal Decentralization and Poverty*" mencoba membuktikan adanya keterkaitan antara desentralisasi fiskal dengan kemiskinan serta meneliti dampak diberlakukannya desentralisasi fiskal terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara keduanya bersifat positif, artinya semakin tinggi tingkat desentralisasi fiskal akan meningkatkan HDI

yang menunjukkan semakin sedikitnya jumlah penduduk miskin. Selain itu, Hadi Sasana (2009) juga telah meneliti pengaruh desentralisasi fiskal dari sisi pendapatan terhadap kemiskinan.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008) dengan judul "Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Metode analisis yang digunakan yaitu Analisa deskriptif dan analisis ekonometrik, Analisis ekonometrik menggunakan panel data, yang terdiri dari data *time series* tahun 1995-2005 dan data *cross section* dari 26 provinsi di Indonesia. Model Regresi yang digunakan yaitu:

$$\begin{aligned} \text{POVERTY}_{ij} = & \beta_0 + \beta_1 \text{PDRB}_{ij} + \beta_2 \text{POPULASI}_{ij} + \beta_3 \text{AGRISHARE}_{ij} + \\ & \beta_4 \text{INDUSTRISHARE}_{ij} + \beta_5 \text{INFLASI}_{ij} + \beta_6 \text{SMP}_{ij} + \beta_7 \text{SMA}_{ij} + \beta_8 \text{DIPLM}_{ij} \\ & + \beta_9 \text{DUMMY KRISIS}_{ij} + \varepsilon_{ij} \end{aligned}$$

Hasil penelitian menunjukkan kurangnya kualitas pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh angka kemiskinan yang relatif persiten di atas 20 persen dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Jumlah penduduk miskin akibat krisis ekonomi belum berhasil dikurangi bahkan cenderung meningkat. Penyebaran penduduk miskin terpusat di Pulau Jawa dan

Sumatera, terutama di pedesaan dengan pertanian sebagai sumber utama pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin walaupun dengan magnitudo yang relatif kecil, seperti inflasi, populasi penduduk, share sektor pertanian, dan sektor industri. Namun variabel yang signifikan dan relative besar pengaruhnya terhadap penurunan jumlah penduduk miskin adalah sector pendidikan.

2. Agrawal (2008), dalam jurnal yang berjudul "*Economic Growth and Poverty Reduction: Evidence from Kazakhtan*", melakukan penelitiannya untuk menguji hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode panel data untuk setiap propinsi di Kazakhtan selama periode 2000-2002 dengan fixed effect model (FEM). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, yang diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga kerja dan tingginya tingkat upah riil, berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Ketimpangan yang menurun tajam selama periode pertumbuhan tinggi (1998-2003) juga memiliki pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif dengan kemiskinan, sedangkan ketimpangan memiliki hubungan yang positif dengan kemiskinan. Ketika kemiskinan di Kazakhstan menurun sejalan dengan tingkat pertumbuhan GDP per

kapita yang meningkat, hal ini juga diikuti dengan penurunan ketimpangan. Model yang digunakan:

$$\Delta \text{poverty} = \text{growth} + \text{equality} + \text{unemployment} + \text{wages}$$

Poverty : kemiskinan

Growth : pertumbuhan ekonomi

Equality : ketimpangan distribusi pendapatan

Unemployment : pengangguran

Wages : tingkat upah

3. Penelitian yang dilakukan oleh Usman, dkk (2004) dengan judul “ Analisis Determinan Kemiskinan Sebelum dan Sesudah Desentralisasi Fiskal” . Dengan mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan maka akan mempermudah pembuat kebijakan dalam menentukan kebijakan apa yang sesuai untuk penanggulangan kemiskinan. Secara umum, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan faktor determinan kemiskinan sebelum dan sesudah diterapkannya desentralisasi fiskal. Analisis tentang variabel-variabel determinan kemiskinan ini dilakukan dengan menggunakan Model Regresi Logit (Model Logit). Model Logit adalah model regresi dimana variable bebasnya bersifat kualitatif, misalnya untuk variable biner (dua kategori) seperti miskin dan tidak miskin, miskin diberi nilai 1 sedangkan tidak miskin 0. Hasil analisis menunjukkan pada faktor

komunitas terdapat variable yang mengalami perubahan pada tahun 1999 sampai 2002. Salah satu variabel tersebut adalah infrastruktur jalan . Pada tahun 2002 (setelah desentralisasi fiskal) kondisi jalan buruk sehingga berdampak pada meningkatnya kemiskinan. Dari hasil penelitian tersebut secara keseluruhan menunjukkan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah dalam penanggulangan kemiskinan adalah sektor-sektor yang berhubungan dengan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan keluarga, kesejahteraan keluarga, dan infrastruktur.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wongdesmiwati (2009) dengan judul “Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (Analisis Ekonometri)”. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di Indonesia. dalam melakukan analisis factor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan data-data yang digunakan adalah data sekunder mengenai jumlah penduduk, produk domestic bruto, angka melek huruf, angka harapan hidup, penggunaan listrik dan konsumsi makanan. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda (multiple regression) dengan menggunakan alat analisis evIEWS 4.1.

Bentuk persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + \beta_5 X_{5i} + \beta_6 X_{6i} + \epsilon_i$$

Alternative persamaan yang mungkin digunakan adalah model double log (log-log) bentuk persamaan linear yang diasumsikan adalah sebagai berikut:

$$\text{Log}Y_i = \beta_0 + \beta_1\text{Log}X_{1i} + \beta_2\text{Log}X_{2i} + \beta_3\text{Log}X_{3i} + \beta_4\text{Log}X_{4i} + \beta_5\text{Log}X_{5i} + \beta_6\text{Log}X_{6i} + \epsilon_i$$

Dimana:

$i : 1,2,3,\dots,n$

Y_i : Jumlah penduduk miskin (Penduduk miskin)

X_{1i} : Jumlah penduduk Indonesia per tahun (Jumlah penduduk)

X_{2i} : Produk Domestik Bruto (PDB)

X_{3i} : Angka Harapan Hidup (AHH)

X_{4i} : Persentase Angka Melek Huruf (AMH)

X_{5i} : Persentase penggunaan listrik (Listrik)

X_{6i} : Persentase konsumsi makanan (KM)

β_0 : intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$, merupakan penduga (koefisien regresi) model persamaan dan ϵ_i adalah besaran yang membuat nilai Y menyimpang dari garis regresinya.

Hasil penelitian menunjukkan hanya ada tiga variabel yang terbukti signifikan mempengaruhi jumlah penduduk miskin, yaitu jumlah penduduk, Produk Domestik Bruto (PDB), dan Angka Melek Huruf.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Skira (2006) dengan judul "*Fiskal Decentralization and Poverty*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dengan menggunakan model regresi. Model yang digunakan yaitu:

$$Pov_{it} = f(Dec_{it}, SocExp_{it}, iGINI_{it}, iGDP_{it}, Z_{it})$$

Kemiskinan (pov) menggunakan indikator *Human Development Indeks* (HDI), Desentralisasi fiskal (Dec) menggunakan ukuran pengeluaran, Pengeluaran sosial (SocExp) merupakan pengeluaran pemerintah yang bersifat pro-poor, indeks gini (iGINI) merupakan ukuran ketimpangan pendapatan antar wilayah, pendapatan (iGDP) dihitung dari GDP per kapita, sedangkan Z adalah variabel kontrol yang terdiri atas kepadatan penduduk, tingkat fertilitas, dan pendidikan. Data diolah melalui analisis regresi dengan menggunakan *fixed effect model* (FEM) dan *Random effect model* (REM). Hasil analisis regresi menunjukkan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kemiskinan, pengeluaran sosial berpengaruh positif terhadap kemiskinan, ketimpangan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, pendapatan berdampak positif terhadap kemiskinan, kepadatan penduduk berdampak positif terhadap kemiskinan dengan model random effect dan negatif dengan *Fixed Effect Model*; fertilitas berdampak negatif terhadap kemiskinan, dan terakhir, pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tujuan	Model regresi	Metode analisis	Hasil empiris
1.	Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008)	menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.	$POVERTY_{ij} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{ij} + \beta_2 POPULASI_{ij} + \beta_3 AGRISHARE_{ij} + \beta_4 INDUSTRISHARE_{ij} + \beta_5 INFLASI_{ij} + \beta_6 SMP_{ij} + \beta_7 SMA_{ij} + \beta_8 DIPLM_{ij} + \beta_9 DUMMY\ KRISIS_{ij} + \varepsilon_{ij}$	Panel data	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, agrishare berpengaruh negative dsignifi dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, industrishare berpengaruh negative dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, capaian pendidikan SMP, SMA, dan Diploma berpengaruh negative dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dummy krisis berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.
2.	Pradeep Agrawal (2008)	Mengetahui hubungan antara	$\Delta poverty = growth +$	Fixed Effect Model	ketika terjadi pertumbuhan ekonomi,

		<p>pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan</p>	<p>equality + unemployment + wages</p> <p>Poverty : kemiskinan</p> <p>Growth : pertumbuhan ekonomi</p> <p>Equality : ketimpangan distribusi pendapatan</p> <p>Unemployment : pengangguran</p> <p>Wages : tingkat upah</p>	(FEM)	<p>yang diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga kerja dan tingginya tingkat upah riil, berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif dengan kemiskinan, sedangkan ketimpangan memiliki hubungan yang positif dengan kemiskinan. Δ</p>
3.	Usman, <i>et al</i> (2004)	<p>Mengetahui faktor determinan kemiskinan sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal</p>	$P_i = \frac{1}{1 + e^{-z_i}} = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_j \sum_{j=1}^n X_{ji})}}$ <p>Dimana: e = bilangan dasar logaritma natural (ln) sebesar 2.71828128 <i>P_i</i> = peluang bahwa suatu obyek pengamatan ke-<i>i</i> akan tergolong ke dalam kategori miskin berdasarkan nilai tertentu dari variabel bebas <i>X_j</i>. Sementara variabel bebasnya (<i>X_j</i>) adalah faktor-faktor determinan seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karakteristik wilayah 2. Faktor komunitas 3. Karakteristik rumah tangga, dan 4. Karakteristik individu. <p>Melalui proses penurunan</p>	Model Regresi Logit	<p>Dari hasil penelitian tersebut secara keseluruhan menunjukkan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah dalam penanggulangan kemiskinan adalah sektor-sektor yang berhubungan dengan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan keluarga, kesejahteraan keluarga, dan infrastruktur.</p>

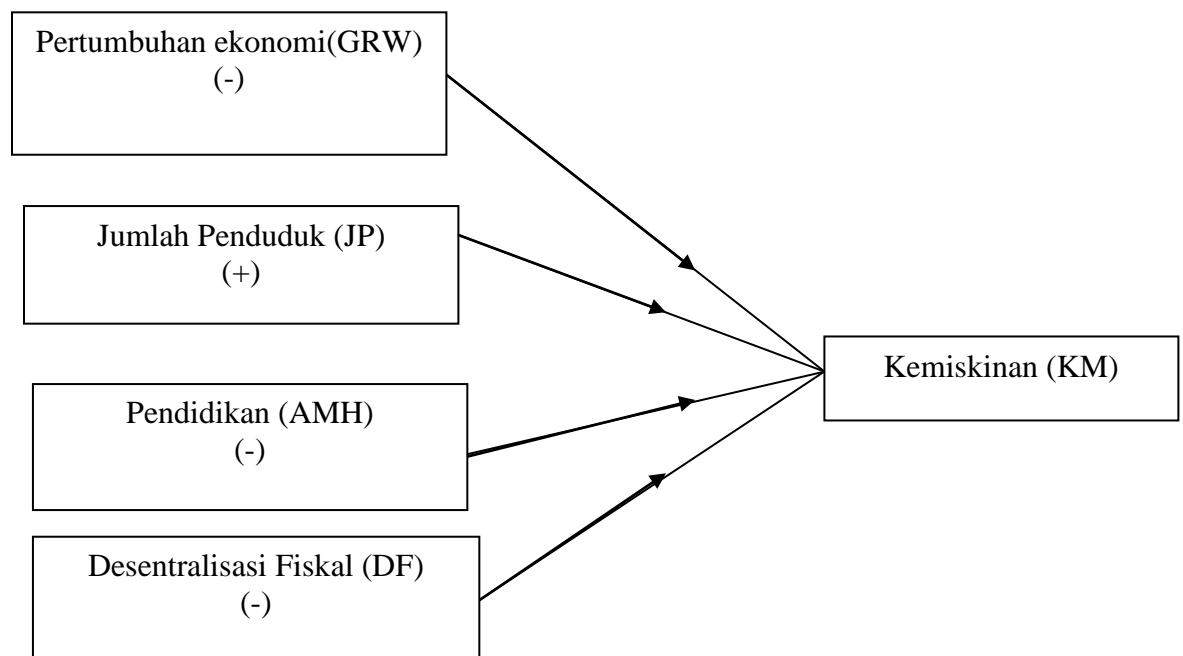
			terhadap fungsi peluang logistik kumulat		
4.	Wongdesmiwati (2010)	Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin	$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + \beta_5 X_{5i} + \beta_6 X_{6i} + \epsilon_i$ <p>Dimana: i : 1,2,3,...,n Y_i : Jumlah penduduk miskin (Penduduk miskin) X_{1i} : Jumlah penduduk Indonesia per tahun (Jumlah penduduk) X_{2i} : Produk Domestik Bruto (PDB) X_{3i} : Angka Harapan Hidup (AHH) X_{4i} : Persentase Angka Melek Huruf (AMH) X_{5i} : Persentase penggunaan listrik (Listrik) X_{6i} : Persentase konsumsi makanan (KM) β_0 : intersept</p>	analisis regresi berganda (<i>multiple regression</i>)	variabel yang terbukti signifikan mempengaruhi jumlah penduduk miskin, yaitu jumlah penduduk, Produk Domestik Bruto (PDB), dan Angka Melek Huruf.
5.	Meghan Skira (2006)	mengetahui dampak desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan	$Pov_{it} = f (Dec_{it} SocExp_{it} iGINI_{it} iGDP_{it} Z_{it})$ <p>Dimana: Pov: kemiskinan Dec: desentralisasi fiskal Socexp: pengeluaran social iGINI: ketimpangan Z : variable control yang terdiri atas kepadatan penduduk, fertilitas, dan pendidikan</p>	Panel data, Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM)	desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kemiskinan, pengeluaran sosial berpengaruh positif terhadap kemiskinan, ketimpangan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, pendapatan berdampak positif terhadap

					<p>kemiskinan, kepadatan penduduk berdampak positif terhadap kemiskinan dengan model random effect dan negatif dengan <i>Fixed Effect Model</i>; fertilitas berdampak negatif terhadap kemiskinan, dan terakhir, pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan.</p>
--	--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan tinjauan pustaka serta mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini tersaji pada gambar 2.1, sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber: Skira (2006), Agrawal (2008), Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008), Wongdesmiwati (2010).

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang bersifat sementara tentang adanya suatu hubungan tertentu antara variabel-variabel yang digunakan. Sifat sementara pada hipotesis ini berarti bahwa hipotesis dapat diubah, diganti dengan hipotesis lain

yang lebih tepat. Hal ini dimungkinkan karena hipotesis yang diperoleh tergantung pada masalah yang diteliti dan konsep yang digunakan.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan.
2. Diduga jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap kemiskinan.
3. Diduga pendidikan mempunyai pengaruh negative terhadap kemiskinan.
4. Diduga desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau subyek yang mempunyai "variasi" antara satu orang dengan orang yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain (Hatch dan Farhady dalam Sugiyono, 2005). Terdapat lima jenis variabel, yaitu: variabel independen (pengaruh, bebas, stimulus, prediktor), variabel dependen (dipengaruhi, terikat, output, kriteria, konsekuen), variabel moderator, variabel intervening (antara), dan variabel kontrol (Sugiyono, 2005).

3.1.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (terikat) dan empat variabel independen (bebas). Variabel dependen yang digunakan yaitu Kemiskinan (KM). Sementara empat variabel independen yang digunakan antara lain: Pertumbuhan ekonomi (GRW), Jumlah penduduk (JP), Pendidikan (AMH), dan Desentralisasi fiskal (DF)

3.1.2 Definisi Operasional

1. Kemiskinan (KM)

Kemiskinan dalam penelitian ini diukur dengan besarnya jumlah penduduk miskin absolut menurut kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) di masing-masing kabupaten/kota Jawa Tengah selama periode tahun 2004-2008. Menurut BPS Jumlah penduduk miskin adalah jumlah keseluruhan populasi dengan pengeluaran per kapita berada di bawah ambang batas tertentu yang dinyatakan sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran perkapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak (BPS, 2007). Kebutuhan minimum makanan menggunakan patokan 2.100 kalori/hari, kebutuhan non makanan meliputi perumahan, sandang, aneka barang dan jasa. Satuan dari variabel kemiskinan adalah dalam ribu jiwa.

2. Pertumbuhan ekonomi (GRW)

Indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (BPS, 2006):

$$\text{Pertumbuhan ekonomi} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} * 100\%$$

Dimana:

$PDRB_t$: PDRB tahun t

$PDRB_{t-1}$: PDRB tahun sebelumnya

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau secara umum PDRB memberikan gambaran kinerja ekonomi makro suatu wilayah dari waktu ke waktu. Nilai PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB 35 kabupaten/kota Jawa Tengah atas dasar harga konstan 2000 selama tahun 2004-2008. Satuan dari variabel pertumbuhan ekonomi ini adalah persen.

3. Jumlah penduduk (JP)

Jumlah penduduk dalam penelitian ini adalah banyaknya penduduk di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah selama tahun 2004-2008. Satuan variabel jumlah penduduk ini adalah ribu jiwa.

4. Pendidikan (AMH)

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Wongdesemiyati (2010), sebagai indikator pendidikan digunakan Angka Melek Huruf (AMH). Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah (BPS, 2007). Adapun satuan dari variabel pendidikan ini adalah persen.

5. Desentralisasi fiskal (DF)

Dalam penelitian ini desentralisasi fiskal diproksi dengan nilai rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah dana bagi hasil pajak dan bukan

pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah selama tahun 2004-2008. Atau dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Desentralisasi fiskal} = \frac{PAD + \text{Dana Bagi hasil pajak dan non pajak}}{\text{Total pengeluaran}}$$

Perhitungan tersebut mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Hadi Sasana (2009).

6. Dummy Wilayah

Dalam estimasi model panel data ini menggunakan variabel dummy, yaitu dummy wilayah yang meliputi kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan wilayah acuan (*benchmark*) kab. Brebes karena selama periode penelitian Kab. Brebes memiliki jumlah penduduk miskin terbesar. Penggunaan dummy wilayah dalam penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan yang terjadi antar wilayah (Kabupaten/Kota) dalam lima tahun periode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan tiga puluh empat dummy wilayah yaitu dummy kab. Cilacap, dummy Kab. Banyumas, Dummy Kab. Purbalingga, dummy Kab. Banjarnegara, dummy kab. Kebumen, dummy kab. Purworejo, dummy Kab. Wonosobo, dummy Kab. Magelang, dummy Kab. Boyolali, dummy Kab. Klaten, dummy kab. Sukoharjo, kab. Wonogiri, kab. Karanganyar, kab. Sragen, kab. Grobogan, kab. Blora, kab. Rembang, kab. Pati, kab. Kudus, kab. Jepara, kab. Demak, kab. Semarang, kab. Temanggung, kab. Kendal, kab. Batang, kab. Pekalongan, kab. Pemasang, kab. Tegal, kota Magelang, kota Surakarta, kota Salatiga, kota Semarang, kota Pekalongan, kota Tegal.

3.2 Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber antara lain:

1. Kemiskinan

Diperoleh dari data Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

2. PDRB

Diperoleh dari data PDRB Jawa Tengah tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

3. Angka Melek Huruf

Diperoleh dari data Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

4. Jumlah Penduduk

Diperoleh dari data Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Desentralisasi fiskal

Diperoleh dari data Statistik Keuangan Jawa Tengah tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 yang diterbitkan oleh badan Pusat Statistik (BPS).

Penelitian ini menggunakan data panel (*pooling data*) atau data longituginal.

Data panel adalah sekelompok data individual yang diteliti selama rentang waktu tertentu.

Menurut Gujarati (2003) keuntungan menggunakan data panel yaitu:

- a. Mengingat penggunaan data panel juga meliputi data *cross section* dalam rentang waktu tertentu, maka data panel akan memperhitungkan secara eksplisit heterogenitas tersebut
- b. Dengan pengkombinasian, data akan memberikan informasi yang lebih baik, tingkat kolinearitas yang lebih kecil antar variabel dan lebih efisien.
- c. Penggunaan data panel mampu meminimalisasi bias yang dihasilkan jika kita meregresikan data individu ke dalam agregasi yang luas.

Dalam data panel, hilangnya suatu variabel akan tetap menggambarkan perubahan lainnya akibat penggunaan data time series. Selain itu, penggunaan data yang tidak lengkap (*unbalanced data*) tidak akan mengurangi ketajaman estimasi.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui pendalaman literature-literatur yang berkaitan dengan objek studi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan obyek studi.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis informasi kuantitatif (data yang dapat diukur, diuji dan diinformasikan dalam bentuk persamaan, tabel dan sebagainya) (Marzuki, 2005). Tahapan analisis kuantitatif terdiri dari: estimasi model regresi dengan menggunakan data panel, regresi persamaan linier berganda dengan menggunakan metode FEM, uji asumsi klasik dan uji statistik.

3.4.1 Estimasi model regresi

Model yang menjadi dasar dari penelitian ini merujuk pada model yang pernah digunakan dalam penelitian Meghan Skira (2006), Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008), dan Wongdesmiwati (2010). Model dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$KM = f(GRW, JP, AMH, DF) \dots \dots \dots (3.1)$$

Dimana,

KM : kemiskinan (jumlah penduduk miskin)

GRW : pertumbuhan ekonomi

JP : jumlah penduduk

AMH : Angka Melek Huruf

DF : desentralisasi fiskal

Model dasar (3.1) diatas diturunkan menjadi model ekonometrik sebagai berikut:

$$KM_{it} = \beta_0 + \beta_1 GRW_{it} + \beta_2 JP_{it} + \beta_3 5MH_{it} + \beta_4 DF_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (3.2)$$

Dimana i menunjukkan unit *cross section* dan t menunjukkan periode waktu.

3.4.2 Estimasi Model Regresi Dengan Data Panel

Gujarati dalam Firmansyah (2009) menjelaskan bahwa estimasi model regresi dengan menggunakan data panel tergantung pada asumsi yang digunakan pada intersep, slope koefisien, dan *error term*. Kemungkinannya yaitu:

- a. Asumsi bahwa intersep dan koefisien slope (kemiringan) adalah konstan antar waktu (*time*) dan ruang (*space*) dan error term mencakup perbedaan sepanjang waktu dan individu (ruang).
- b. Koefisien slope konstan tapi intersep bervariasi antar individu (wilayah)
- c. Koefisien slope konstan tapi intersep bervariasi antar waktu
- d. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar waktu dan individu (wilayah)
- e. Seluruh koefisien (intersep dan koefisien slope) bervariasi antar individu (wilayah)

- f. Intersep konstan sebagaimana koefisien slope bervariasi antar waktu

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel adalah dengan menggunakan *fixed effect*. *Fixed Effect Model* (FEM) mengasumsikan bahwa persamaan regresi memiliki slope konstan sedangkan intersep bervariasi antar individual. Dalam hal ini, intersep dari masing-masing individu diasumsikan memiliki perbedaan yang disebabkan oleh karakteristik khusus yang dimiliki oleh masing-masing individu. Terminologi *fixed effect* menunjukkan bahwa meskipun intersep bervariasi sepanjang individu, namun setiap intersep individu tersebut tidak bervariasi sepanjang waktu, yang disebut *time invariant*. Dapat juga dinyatakan bahwa berdasarkan model FEM, diasumsikan bahwa koefisien slope dari regresor tidak bervariasi antar individu maupun antar waktu.

Dalam penelitian ini digunakan metode FEM dan asumsi yang kedua, yaitu koefisien slope konstan tapi intersep bervariasi antar wilayah. Bentuk model *fixed effect* adalah dengan memasukan variabel *dummy* untuk menyatakan perbedaan intersep. Ketika *dummy* digunakan untuk mengestimasi *fixed effect*, maka persamaan tersebut disebut sebagai *Least Square Dummy Variable* (LSDV). Penggunaan *dummy* dalam pada penelitian ini yaitu menggunakan *dummy* wilayah.

Penggunaan *dummy* wilayah dalam penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan yang terjadi antar wilayah (kabupaten/kota) dalam lima tahun periode penelitian, dimana kabupaten Brebes digunakan sebagai wilayah acuan (*bancmark*).

Alasan penggunaan Kabupaten Brebes sebagai *benchmark* adalah karena Kabupaten Brebes memiliki jumlah penduduk miskin yang paling tinggi.

Setelah memasukkan variable dummy wilayah ke dalam persamaan (3.2), maka model persamaan adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 KM_{it} = & \beta_0 + \beta_1 GRW_{it} + \beta_2 JP_{it} + \beta_3 5MH_{it} + \beta_4 DF_{it} + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \delta_3 D_3 + \delta_4 D_4 + \\
 & \delta_5 D_5 + \delta_6 D_6 + \delta_7 D_7 + \delta_8 D_8 + \delta_9 D_9 + \delta_{10} D_{10} + \delta_{11} D_{11} + \delta_{12} D_{12} + \delta_{13} \\
 & D_{13} + \delta_{14} D_{14} + \delta_{15} D_{15} + \delta_{16} D_{16} + \delta_{17} D_{17} + \delta_{18} D_{18} + \delta_{19} D_{19} + \delta_{20} D_{20} + \delta_{21} \\
 & D_{21} + \delta_{22} D_{22} + \delta_{23} D_{23} + \delta_{24} D_{24} + \delta_{25} D_{25} + \delta_{26} D_{26} + \delta_{27} D_{27} + \delta_{28} D_{28} + \delta_{29} \\
 & D_{29} + \delta_{30} D_{30} + \delta_{31} D_{31} + \delta_{32} D_{32} + \delta_{33} D_{33} + \delta_{34} D_{34} + \varepsilon_{it} \\
 & \dots\dots\dots(3.3)
 \end{aligned}$$

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Persamaan yang diperoleh dari sebuah estimasi dapat dioperasikan secara statistik jika memenuhi asumsi klasik, yaitu memenuhi asumsi bebas multikolinearitas, heteroskesidasitas, autokorelasi, serta disturbance term terdistribusi secara normal. Pengujian asumsi klasik ini dilakukan dengan bantuan software eviews 6.

3.4.2.1 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana disturbance term pada periode/observasi tertentu berkorelasi dengan *disturbance term* pada periode/observasi lain yang berurutan, dengan kata lain *disturbance term* tidak random (Gujarati dalam Firmansyah, 2006)

Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan uji Breusch & Godfrey Test (*BG test*) (Gujarati 2003). Pengujian ini dilakukan dengan meregresi variabel pengganggu u_t dengan menggunakan model *autoregressive* dengan orde ρ sebagai berikut:

$$u_t = \rho_1 u_{t-1} + \rho_2 u_{t-2} + \dots + \rho_p u_{t-p} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.4)$$

Dengan H_0 adalah $\rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_p = 0$, dimana koefisien *autoregressive* secara keseluruhan sama dengan nol, menunjukkan tidak terdapat autokorelasi pada setiap orde. Secara manual jika $(n-p) \cdot R^2$ atau X^2 hitung lebih besar dari X^2 tabel, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model ditolak (Firmansyah, 2006)

3.4.2.2 Uji Heteroskedastis

Salah satu uji penting dalam regresi linier klasik adalah bahwa gangguan yang muncul dalam regresi populasi adalah homoskedastis, yaitu semua gangguan memiliki varians yang sama atau varians setiap gangguan yang dibatasi oleh nilai tertentu mengenai pada variabel-variabel independen berbentuk nilai konstan yang sama dengan σ^2 . Dan jika suatu populasi yang dianalisis memiliki gangguan yang variansnya tidak sama maka mengindikasikan terjadinya kasus heteroskesidasitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskesidasitas dapat digunakan uji white. Secara manual, uji ini dilakukan dengan meregresi residual kuadrat (u_1^2) dengan variabel bebas. Dapatkan nilai R^2 untuk menghitung X^2 , dimana $X^2 = n \cdot R^2$ (Firmansyah,

2006). Kriteria yang digunakan adalah apabila X^2 -hitung lebih kecil daripada X^2 -tabel, maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

3.4.2.3 Uji Multikolinieritas

Salah satu asumsi model regresi klasik adalah tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen dalam model regresi. Menurut Gujarati (2003) multikolinearitas berarti adanya hubungan sempurna atau pasti antara beberapa variabel independen dalam model regresi.

Pengujian terhadap ada tidaknya multikolinearitas ini dilakukan dengan cara melihat koefisien korelasi antar variabel. Apabila tidak ada yang mendekati angka 1 maka dapat dikatakan tidak terdapat multikolinearitas sempurna.

3.4.2.4 Uji Normalitas

Regresi linier normal klasik mengasumsikan bahwa distribusi probabilitas dari gangguan μ_1 memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. Dengan asumsi ini, penaksir akan memenuhi sifat-sifat statistik yang diinginkan seperti *unbiased* dan memiliki varian yang minimum (Gujarati, 2003).

Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain J-B Test dan metode grafik. Penelitian ini akan menggunakan metode J-B test, yang dilakukan dengan menghitung nilai skewness dan kurtosis, apabila J-B hitung $<$ nilai X^2 (chi-square) tabel, maka nilai residual berdistribusi normal (Firmansyah, 2006)

3.4.4 Pengujian Statistik Analisis Regresi

Uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji diterima atau ditolaknya (secara statistik) hasil hipotesis nol (H_0) dari sampel. Keputusan untuk mengolah H_0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada (Gujarati, 2003).

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 disebut juga koefisien determinasi. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependennya (*goodness of fit test*). Nilai R^2 dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut (Firmansyah, 2006):

$$R^2 = \frac{\beta_1 \sum y_1 x_1 + \beta_2 \sum y_2 x_2 + \dots + \beta_n \sum y_n x_n}{\sum y_n^2}$$

Nilai R^2 berkisar antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen, dan model tersebut dapat dikatakan baik (Gujarati, 2003).

2. Pengujian *Best of Fit* Model

- a. Pengujian koefisien regresi serentak (Uji F)

Dalam Gujarati (2003), uji F merupakan alat uji statistik secara bersama-sama atau keseluruhan dari koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Dari uji F dapat diketahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau tidak terhadap variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen, atau:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

Sedangkan hipotesis alternatifnya (H_1) adalah semua variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama, atau:

$$H_1 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 \neq 0$$

Kriteria dalam uji F yaitu bila nilai F_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan nilai F_{tabel} ($F > F_{\alpha, df}$), maka H_0 ditolak, dan H_1 diterima. Atau apabila F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Sebaliknya, apabila F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} , maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama. F_{tabel} diperoleh dengan derajat kebebasan variasi regresi k (banyaknya variabel), dan derajat kebebasan variasi residual $n-k-1$ (banyaknya observasi-banyaknya variabel-1)

b. Pengujian koefisien regresi secara individual (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependennya. Hipotesis yang diajukan yaitu:

Hipotesis 1

$H_0 : \beta_1 \geq 0$ Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan

$H_1 : \beta_1 < 0$ Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Hipotesis 2

$H_0 : \beta_3 \leq 0$ Jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan

$H_1 : \beta_3 > 0$ Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan

Hipotesis 3

$H_0 : \beta_4 \geq 0$ Pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan

$H_1 : \beta_4 < 0$ Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan

Hipotesis 4

$H_0 : \beta_5 \geq 0$ Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan

$H_1 : \beta_5 < 0$ Desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan

Uji t dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Nilai t hitung dapat diperoleh dari nilai t statistik pada output eviews, sedangkan nilai t tabel dapat diperoleh dari tabel t dengan menggunakan *degree of freedom* (df) sebesar n-k. Apabila t hitung lebih besar daripada t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sebaliknya jika t hitung lebih kecil daripada t tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Cara kedua yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas output eviews dengan nilai α . Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari nilai α maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar daripada nilai α maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dalam pembahasan ini akan dideskripsikan kondisi makro ekonomi 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang meliputi masalah kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, pendidikan, dan desentralisasi fiskal.

4.1.1 Kondisi Kemiskinan di Jawa Tengah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 mengakibatkan memburuknya perekonomian nasional pada umumnya dan juga perekonomian regional pada khususnya. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin. Perekonomian berangsur membaik, akan tetapi masalah kemiskinan masih merupakan masalah utama yang belum terselesaikan, karena masih tingginya jumlah penduduk miskin. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Berikut data jumlah penduduk miskin di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah:

**Tabel 4.1 Jumlah (jiwa) dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Miskin (%)
Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2004-2008**

No	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-rata Pertumbuhan
1	Kab. Cilacap	346.200	361.000	402.100	363.600	343.900	0,1668
2	Kab. Banyumas	325.200	326.800	362.200	333.000	340.700	1,3937
3	Kab. Purbalingga	266.500	250.600	362.900	246.300	221.900	-0,7976
4	Kab. Banjarnegara	240.300	239.500	251.300	232.900	200.600	-4,1491
5	Kab. Kebumen	371.500	349.300	388.700	362.400	334.900	-2,2626
6	Kab. Purworejo	167.100	157.100	162.300	146.000	130.000	-5,9191
7	Kab. Wonosobo	254.700	239.400	257.500	241.400	207.500	-4,6855
8	Kab. Magelang	185.800	174.700	199.100	200.100	190.800	0,9618
9	Kab. Boyolali	172.300	162.000	184.600	167.000	158.400	-1,6778
10	Kab. Klaten	263.900	248.100	257.400	249.100	243.100	-1,9680
11	Kab. Sukoharjo	118.100	116.000	126.500	113.800	99.100	-3,9208
12	Kab. Wonogiri	246.100	246.800	262.900	237.400	201.100	-4,5456
13	Kab. Karanganyar	132.600	130.400	148.600	138.900	125.900	-0,8972
14	Kab. Sragen	225.100	204.200	201.900	180.700	177.100	-5,7259
15	Kab. Grobogan	385.100	362.100	361.900	330.400	262.000	-8,8585
16	Kab. Blora	191.200	177.100	197.600	176.800	155.100	-4,6498
17	Kab. Rembang	186.300	175.100	188.500	174.300	154.700	-4,2843
18	Kab. Pati	247.900	233.000	256.500	228.800	207.200	-4,0411
19	Kab. Kudus	85.500	80.400	91.600	82.400	97.800	4,1528
20	Kab. Jepara	104.000	108.500	123.600	111.200	119.200	3,8515
21	Kab. Demak	260.600	245.000	263.500	238.900	217.200	-4,2136
22	Kab. Semarang	121.300	114.000	120.700	110.100	102.500	-3,9565
23	Kab. Temanggung	107.200	100.800	114.900	115.000	114.700	1,9610
24	Kab. Kendal	185.500	174.400	198.700	192.700	168.200	-1,9460
25	Kab. Batang	133.300	125.300	134.400	139.800	122.000	-1,8634
26	Kab. Pekalongan	181.100	170.300	190.000	170.000	164.300	-2,0687
27	Kab. Pemasang	299.100	300.200	338.200	307.100	325.200	2,4310
28	Kab. Tegal	297.200	279.400	289.700	258.600	220.700	-6,9235
29	Kab. Brebes	519.600	488.600	533.100	492.200	459.300	-2,8037
30	Kota Magelang	17.400	16.400	14.500	13.000	14.900	-3,2655
31	Kota Surakarta	69.500	69.100	77.600	69.800	83.400	5,2895
32	Kota Salatiga	16.000	15.000	15.200	15.600	14.900	-1,6931
33	Kota Semarang	79.000	58.700	77.800	77.600	28.000	-14,3331
34	Kota Pekalongan	18.600	17.500	19.900	17.900	26.800	11,8677
35	Kota Tegal	23.100	21.700	24.700	22.200	26.800	4,5909

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2005-2009

Data pada Tabel 4.1 juga menunjukkan terjadinya lonjakan jumlah penduduk miskin di semua wilayah pada tahun 2006. Peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 disebabkan oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi pada 1 september 2005. Kenaikan harga BBM ini memicu kenaikan harga barang-barang lain sehingga daya beli masyarakat menjadi menurun. Pada tahun-tahun selanjutnya jumlah penduduk miskin cenderung mengalami penurunan, meskipun ada beberapa wilayah yang jumlah penduduk miskinnya meningkat, misalnya di Kota Tegal dan Kota Pekalongan, dimana pada tahun 2008 jumlah penduduk miskinnya meningkat dari tahun sebelumnya.

Wilayah dengan rata-rata pertumbuhan penduduk miskin tertinggi yaitu Kota Pekalongan sebesar 11,8677 persen. Tahun 2008 Kota Pekalongan mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin yang cukup besar. Selanjutnya Kota Surakarta yang memiliki rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk miskin terbesar kedua sebesar 5,2895 persen, dimana peningkatan jumlah penduduk miskin terbesar juga terjadi pada tahun 2008. Ketiga, Kota Tegal dengan rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk miskin 4,5909 persen. Dari data tersebut menunjukkan bahwa di wilayah Kota justru memiliki pertumbuhan penduduk miskin yang tinggi. Menurut Thorbecke (1997), kemiskinan dapat lebih cepat tumbuh di perkotaan dibandingkan dengan perdesaan karena, pertama, krisis cenderung memberi pengaruh terburuk kepada beberapa sektor ekonomi utama di wilayah perkotaan, seperti konstruksi, perdagangan dan perbankan yang membawa dampak negatif terhadap pengangguran di perkotaan.

4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi di JawaTengah

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya (Wongdesmiyati, 2010). Pertumbuhan ekonomi sering kali dijadikan tolok ukur kinerja perekonomian suatu wilayah, akan tetapi belum pasti tingginya pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingginya juga tingkat kesejahteraan rakyatnya.

Menurut Todaro (2000) terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu: akumulasi modal yang meliputi semua bentuk investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk yang akan memperbanyak akumulasi kapital, serta kemajuan teknologi. Perbedaan sumber daya baik modal fisik maupun modal manusia yang dimiliki masing-masing wilayah menyebabkan berbeda pula pertumbuhan ekonominya. Berikut data pertumbuhan ekonomi 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah:

**Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Jawa Tengah
Tahun 2004-2008 (%)**

No	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-rata
1	Kab. Cilacap	4,54	4,93	5,33	4,72	4,87	4,878
2	Kab. Banyumas	3,71	4,17	3,2	4,48	5,29	4,17
3	Kab. Purbalingga	3,16	3,34	4,18	5,06	6,19	4,386
4	Kab. Banjarnegara	2,96	3,81	3,95	4,35	5,01	4,016
5	Kab. Kebumen	2,93	1,18	3,2	4,08	4,52	3,182
6	Kab. Purworejo	3,64	4,17	4,85	5,23	6,08	4,794
7	Kab. Wonosobo	2,28	2,34	3,19	3,23	3,58	2,924
8	Kab. Magelang	4,01	4,03	4,62	4,91	5,21	4,556
9	Kab. Boyolali	4,86	3,42	4,08	4,19	4,08	4,126
10	Kab. Klaten	4,94	4,86	4,59	2,3	3,31	4
11	Kab. Sukoharjo	3,97	4,33	4,11	4,53	5,11	4,41
12	Kab. Wonogiri	2,53	4,1	4,31	4,07	5,07	4,016
13	Kab. Karanganyar	5,63	5,98	5,49	5,08	5,74	5,584
14	Kab. Sragen	3,63	4,93	5,16	5,18	5,73	4,926
15	Kab. Grobogan	2,2	3,78	4,74	4	4,37	3,818
16	Kab. Blora	3,28	3,75	4,07	3,85	3,95	3,78
17	Kab. Rembang	3,01	4,53	3,56	5,53	3,81	4,088
18	Kab. Pati	-2,12	4,25	3,94	4,45	5,19	3,142
19	Kab. Kudus	5,56	8,7	4,4	2,48	3,23	4,874
20	Kab. Jepara	3,76	4	4,23	4,19	4,74	4,184
21	Kab. Demak	2,83	3,4	3,86	4,02	4,15	3,652
22	Kab. Semarang	3,75	1,46	3,11	3,81	4,72	3,37
23	Kab. Temanggung	3,37	3,92	3,99	3,31	4,03	3,724
24	Kab. Kendal	2,85	2,61	2,63	3,66	4,28	3,206
25	Kab. Batang	2,55	2,07	2,8	2,51	3,49	2,684
26	Kab. Pekalongan	3,66	4,39	3,98	4,21	4,59	4,166
27	Kab. Pemasang	3,35	3,84	4,05	3,72	4,47	3,886
28	Kab. Tegal	5,54	5,29	4,72	5,19	5,51	5,25
29	Kab. Brebes	4,86	4,83	4,8	4,71	4,79	4,798
30	Kota Magelang	3,74	3,71	4,33	2,44	5,17	3,878
31	Kota Surakarta	6,11	5,8	5,15	5,43	5,82	5,662
32	Kota Salatiga	4,25	4,24	4,15	4,17	5,39	4,44
33	Kota Semarang	4,04	4,12	5,14	5,71	5,98	4,998
34	Kota Pekalongan	3,86	4,07	3,82	3,06	3,8	3,722
35	Kota Tegal	5,82	5,85	4,87	5,15	5,21	5,38

Sumber: PDRB Jawa Tengah 2004-2008, diolah

Tabel 4.2 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2004-2008. Hampir di semua kabupaten/kota mengalami pertumbuhan yang positif, kecuali di Kab. Pati pada tahun 2004 mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan positif menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja ekonomi atau peningkatan nilai PDRB dari tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan negative berarti menunjukkan terjadinya penurunan kinerja ekonomi atau penurunan nilai PDRB dari tahun sebelumnya. Wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu Kota Surakarta, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,662 persen, sedangkan wilayah yang pertumbuhannya terendah yaitu Kabupaten Batang sebesar 2,684 persen.

4.1.3 Jumlah Penduduk di Jawa Tengah

Jumlah penduduk suatu wilayah menunjukkan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki wilayah tersebut sebagai modal pembangunan. Jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat pembangunan. Faktor pendorong, karena semakin banyak penduduk maka semakin banyak tenaga kerja yang dimiliki sebagai modal pembangunan dan juga memperluas pasar. Factor penghambat karena akan menurunkan produktivitas. Jumlah penduduk yang besar yang tidak diimbangi dengan kualitas hidup yang mencukupi akan menimbulkan masalah kemiskinan yang lebih parah. Oleh karena itu penting adanya upaya penekanan laju pertumbuhan penduduk.

**Tabel 4.3 Jumlah Penduduk (jiwa) dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk (%)
Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2004-2008**

No	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-rata Pertumbuhan
1	Kab. Cilacap	1.641.849	1.654.971	1.674.210	1.621.664	1.623.176	-0,2709
2	Kab. Banyumas	1.501.370	1.514.105	1.531.737	1.490.665	1.495.981	-0,0780
3	Kab. Purbalingga	846.924	854.924	863.478	816.720	821.870	-0,7098
4	Kab. Banjarnegara	884.353	891.964	903.919	559.668	864.148	4,6301
5	Kab. Kebumen	1.193.850	1.200.724	1.208.486	1.203.230	1.208.716	0,3108
6	Kab. Purworejo	709.397	709.878	712.003	717.439	719.396	0,3509
7	Kab. Wonosobo	759.018	769.138	779.919	752.136	754.447	-0,1300
8	Kab. Magelang	1.142.467	1.154.862	1.169.638	1.153.234	1.161.278	0,4149
9	Kab. Boyolali	925.722	931.950	941.624	928.164	932.698	0,1925
10	Kab. Klaten	1.120.400	1.127.747	1.139.218	1.126.165	1.128.852	0,1914
11	Kab. Sukoharjo	807.635	820.685	838.149	813.657	819.621	0,3887
12	Kab. Wonogiri	1.004.722	1.007.435	1.010.456	978.808	980.132	-0,6067
13	Kab. Karanganyar	811.877	820.432	834.265	799.595	805.462	-0,1706
14	Kab. Sragen	859.986	863.046	868.036	856.296	857.844	-0,0594
15	Kab. Grobogan	1.299.175	1.314.280	1.334.380	1.318.286	1.326.414	0,5256
16	Kab. Blora	826.702	832.723	840.729	829.745	831.909	0,1610
17	Kab. Rembang	576.417	582.111	588.320	570.870	572.879	-0,1399
18	Kab. Pati	1.187.646	1.197.856	1.213.664	1.165.159	1.167.621	-0,4015
19	Kab. Kudus	738.410	745.584	759.267	764.563	774.838	1,2120
20	Kab. Jepara	1.034.799	1.053.116	1.077.586	1.058.064	1.073.631	0,9383
21	Kab. Demak	1.024.934	1.044.978	1.071.487	1.017.884	1.025.388	0,0567
22	Kab. Semarang	879.785	855.500	894.018	890.898	900.420	0,6155
23	Kab. Temanggung	694.892	704.820	717.486	694.949	700.845	0,2333
24	Kab. Kendal	694.892	704.820	717.486	694.949	700.845	0,2333
25	Kab. Batang	692.519	701.277	712.542	676.152	678.909	-0,4571
26	Kab. Pekalongan	829.984	842.122	858.650	837.906	844.228	0,4409
27	Kab. Pemalang	1.316.977	1.339.112	1.371.943	1.344.597	1.358.952	0,8017
28	Kab. Tegal	1.429.345	1.446.284	1.471.043	1.406.796	1.410.290	-0,3055
29	Kab. Brebes	1.763.581	1.784.094	1.814.274	1.765.564	1.775.939	0,1894
30	Kota Magelang	119.400	123.576	130.732	125.952	132.177	2,6436
31	Kota Surakarta	485.501	505.153	534.540	512.898	517.557	1,6812
32	Kota Salatiga	158.112	164.979	175.967	171.248	174.699	2,5842
33	Kota Semarang	1.389.416	1.406.233	1.435.800	1.468.292	1.488.645	1,7405
34	Kota Pekalongan	271.418	273.633	284.112	271.808	273.342	0,2198
35	Kota Tegal	242.112	240.784	249.612	239.038	239.860	-0,1936

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka, 2005-2009

Tabel 4.3 menunjukkan jumlah penduduk di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2004-2008. Tiga wilayah dengan nilai rata-rata pertumbuhan penduduk terbesar yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kota Magelang dan Kota Salatiga dengan rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk selama periode penelitian sebesar 4,6301 persen, 2,6436 persen dan 2,5842 persen.

4.1.4 Pendidikan di Jawa Tengah

Pendidikan menunjukkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki suatu wilayah. SDM ini yang akan menjadi modal penting dalam proses pembangunan selain modal dalam bentuk investasi materiil lainnya. Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (*human capital*) yang bisa dijadikan investasi yang nantinya tingkat pengembaliannya akan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan. Menurut Todaro, pendekatan modal manusia berfokus pada kemampuan tidak langsung untuk meningkatkan utilitas dengan meningkatkan pendapatan (Todaro, 2000). Dengan melakukan investasi pendidikan, maka akan meningkatkan produktivitas, peningkatan produktivitas akan meningkatkan pendapatan, pendapatan yang cukup akan mampu mengangkat kehidupan masyarakat dari kemiskinan. oleh karena itu pendidikan merupakan hal yang penting untuk memotong rantai kemiskinan.

**Tabel 4.4 Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten/Kota Jawa Tengah
Tahun 2004-2008 (%)**

No	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-rata
1	Kab. Cilacap	88,35	88,45	88,8	89,05	90,1	88,95
2	Kab. Banyumas	91,5	92,05	92,3	93,3	93,9	92,61
3	Kab. Purbalingga	89,75	90,4	90,75	91,15	93	91,01
4	Kab. Banjarnegara	85	86,85	87,15	88,1	88,2	87,06
5	Kab. Kebumen	88,95	89,4	89,75	90,1	90,4	89,72
6	Kab. Purworejo	86,4	87,85	88,2	88,35	89,2	88
7	Kab. Wonosobo	84,95	87,45	87,8	88,3	88,9	87,48
8	Kab. Magelang	89,4	89,55	89,9	90,3	91,3	90,09
9	Kab. Boyolali	84,3	85,1	85,65	86,6	86	85,53
10	Kab. Klaten	82,45	83	83,35	89,35	89,3	85,49
11	Kab. Sukoharjo	87,6	88,4	88,9	90,2	90,4	89,1
12	Kab. Wonogiri	78,75	80,1	80,35	81,4	82	80,52
13	Kab. Karanganyar	81,1	82,05	82,5	84,25	84,8	82,94
14	Kab. Sragen	72,9	75,2	76,45	81,25	81,2	77,4
15	Kab. Grobogan	84,95	85,15	85,35	88,35	90,2	86,8
16	Kab. Blora	77,75	78,75	78,95	81,5	83	79,99
17	Kab. Rembang	86,9	87,65	88,85	89,4	88,8	88,32
18	Kab. Pati	85,8	86,3	86,8	87,2	86,3	86,48
19	Kab. Kudus	89,95	90,5	91	92,15	92	91,12
20	Kab. Jepara	86,65	89,5	90,15	92,6	92,9	90,36
21	Kab. Demak	87,75	88	88,65	90,8	90,8	89,2
22	Kab. Semarang	90,55	92,65	93,6	94,05	93,5	92,87
23	Kab. Temanggung	92,25	94,55	95,25	95,7	95,9	94,73
24	Kab. Kendal	88,1	88,5	88,95	89,7	88,9	88,83
25	Kab. Batang	82,95	83,7	84,15	86,35	87,6	84,95
26	Kab. Pekalongan	85,8	86,95	87,15	87,85	89,9	87,53
27	Kab. Pemasang	85,1	86,9	87,25	87,55	87,3	86,82
28	Kab. Tegal	82,35	82,8	83,4	88,55	89,1	85,24
29	Kab. Brebes	79,55	84,85	85,5	86,45	84,9	84,25
30	Kota Magelang	94,55	96,1	96,5	97,3	97,2	96,33
31	Kota Surakarta	95,65	94,95	95,05	95,45	96,7	95,56
32	Kota Salatiga	95,15	96,55	96,65	96,7	96,5	96,31
33	Kota Semarang	94,65	96,1	96,25	97,05	95,9	95,99
34	Kota Pekalongan	92,65	93,25	93,35	95,15	95,4	93,96
35	Kota Tegal	90,45	90,7	90,8	94,75	94,9	92,32

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka, 2005-2009

Tabel 4.4 menunjukkan Angka Melek Huruf (AMH) di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah selama periode 2004-2008. AMH merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Semakin mendekati 100%, maka semakin tinggi tingkat melek huruf di wilayah tersebut, yang juga menunjukkan tingkat pendidikan penduduk setempat. Wilayah yang AMHnya tertinggi yaitu Kota Magelang dengan rata-rata AMH sebesar 96,33 persen, sedangkan yang terendah yaitu Kabupaten Sragen dengan rata-rata AMH sebesar 77,4 persen.

4.1.5 Desentralisasi Fiskal di Jawa Tengah

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan di bidang fiskal yang meliputi kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintah, dan menentukan alokasi belanja. Desentralisasi fiskal di Indonesia dimulai sejak 1 Januari 2001. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pengukuran derajat desentralisasi fiskal suatu wilayah dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan pengeluaran, karena menunjukkan pertanggung jawaban daerah dalam pengeluaran publiknya.

Dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan karena pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan

mengurus wilayahnya sendiri. Daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi daerah tersebut. Kebijakan-kebijakan yang diambil dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah tersebut. Dengan begitu pengalokasian anggaran daerah menjadi lebih efektif. Berikut data derajat desentralisasi fiskal di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah:

**Tabel 4.5 Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota Jawa Tengah
Tahun 2004-2008 (rasio)**

No	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-rata
1	Kab. Cilacap	0,18	0,20	0,17	0,14	0,08	0,16
2	Kab. Banyumas	0,17	0,19	0,18	0,11	0,17	0,16
3	Kab. Purbalingga	0,13	0,18	0,15	0,10	0,06	0,12
4	Kab. Banjarnegara	0,14	0,16	0,14	0,13	0,06	0,13
5	Kab. Kebumen	0,11	0,13	0,20	0,07	0,11	0,13
6	Kab. Purworejo	0,13	0,14	0,13	0,08	0,13	0,12
7	Kab. Wonosobo	0,12	0,13	0,13	0,07	0,06	0,10
8	Kab. Magelang	0,16	0,18	0,15	0,10	0,14	0,15
9	Kab. Boyolali	0,14	0,17	0,16	0,09	0,06	0,12
10	Kab. Klaten	0,11	0,11	0,09	0,05	0,05	0,08
11	Kab. Sukoharjo	0,14	0,18	0,16	0,12	0,11	0,14
12	Kab. Wonogiri	0,11	0,12	0,12	0,09	0,05	0,10
13	Kab. Karanganyar	0,15	0,15	0,14	0,10	0,14	0,14
14	Kab. Sragen	0,16	0,16	0,13	0,14	0,05	0,13
15	Kab. Grobogan	0,14	0,15	0,14	0,15	0,07	0,13
16	Kab. Blora	0,15	0,20	0,21	0,09	0,18	0,17
17	Kab. Rembang	0,13	0,18	0,16	0,08	0,15	0,14
18	Kab. Pati	0,18	0,18	0,17	0,14	0,14	0,16
19	Kab. Kudus	0,22	0,18	0,20	0,09	0,12	0,16
20	Kab. Jepara	0,18	0,19	0,17	0,16	0,17	0,17
21	Kab. Demak	0,11	0,12	0,12	0,06	0,06	0,09
22	Kab. Semarang	0,18	0,21	0,16	0,12	0,17	0,17
23	Kab. Temanggung	0,12	0,17	0,12	0,12	0,05	0,12
24	Kab. Kendal	0,14	0,17	0,17	0,13	0,14	0,15
25	Kab. Batang	0,13	0,14	0,14	0,12	0,13	0,13
26	Kab. Pekalongan	0,14	0,14	0,12	0,08	0,15	0,13
27	Kab. Pemasang	0,12	0,17	0,15	0,09	0,07	0,12
28	Kab. Tegal	0,20	0,16	0,14	0,09	0,11	0,14
29	Kab. Brebes	0,12	0,15	0,15	0,13	0,13	0,13
30	Kota Magelang	0,20	0,24	0,21	0,12	0,05	0,16
31	Kota Surakarta	0,29	0,30	0,25	0,15	0,22	0,24
32	Kota Salatiga	0,20	0,25	0,21	0,15	0,18	0,20
33	Kota Semarang	0,53	0,59	0,54	0,37	0,38	0,48
34	Kota Pekalongan	0,17	0,18	0,15	0,08	0,14	0,15
35	Kota Tegal	0,24	0,28	0,24	0,19	0,24	0,24

Sumber: Statistik Keuangan Kabupaten/Kota, 2004-2008

Tabel 4.5 menunjukkan derajat desentralisasi fiskal di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah. Wilayah dengan derajat desentralisasi fiskal tertinggi yaitu di Kota Semarang, dengan rata-rata desentralisasi fiskal sebesar 0,48. Selanjutnya, rata-rata derajat desentralisasi fiskal sebesar 0,24 berada di Kota Surakarta dan Kota Tegal, sedangkan yang terendah yaitu Kab. Klaten dengan rata-rata derajat desentralisasi fiskal sebesar 0,08. Dapat disimpulkan bahwa Kota Semarang merupakan wilayah yang memiliki tingkat kemandirian tertinggi di Jawa Tengah, hal tersebut wajar mengingat Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$).

Dalam penelitian ini digunakan uji *Breusch-Godfrey* (BG-Test) untuk menguji ada tidaknya autokorelasi. Hasil uji BG dapat dilihat pada tabel 4. Berikut:

**Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlaation LM Test**

F-statistic	24,85292
Obs*R-square	93,49311

Sumber: Lampiran B

Dalam model persamaan ini, diketahui $n = 175$ dan $k = 38$, maka diperoleh *degree of freedom* (df) sebesar 137 ($n-k$). Dengan menggunakan $\alpha=5$ persen, diperoleh nilai x^2 tabel sebesar 140,169. Dibandingkan dengan nilai Obs*R-squared BG Test dalam persamaan ini adalah 93,49311, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan model kemiskinan tersebut bebas dari autokorelasi, karena nilai x^2 tabel lebih besar dibandingkan dengan nilai obs*R-squared.

4.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Salah satu uji penting dalam regresi linier klasik adalah bahwa gangguan yang muncul dalam regresi populasi adalah homoskedastis, yaitu semua gangguan memiliki varians yang sama atau varians setiap gangguan yang dibatasi oleh nilai tertentu mengenai pada variabel-variabel independen berbentuk nilai konstan yang sama dengan σ^2 .

Dalam penelitian ini digunakan uji white untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskesidasitas. Hasil uji white dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test White**

F-statistic	1,510110
Obs*R-squared	51,92892

Sumber: Lampiran B

$n=175$ dan $k= 38$, maka diperoleh *degree of freedom* (df) sebesar 137. Dengan menggunakan $\alpha = 5$ persen, diperoleh nilai x^2 tabel sebesar 140,169. Dibandingkan

dengan nilai $\text{Obs} \cdot R\text{-square}$ *White Heteroskedasticity Test*, yaitu sebesar 51,92892, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan kemiskinan tersebut bebas dari heteroskedasitas, karena nilai χ^2 tabel lebih besar dibandingkan dengan nilai $\text{Obs} \cdot R\text{-squared}$.

4.2.3 Uji Multikolinieritas

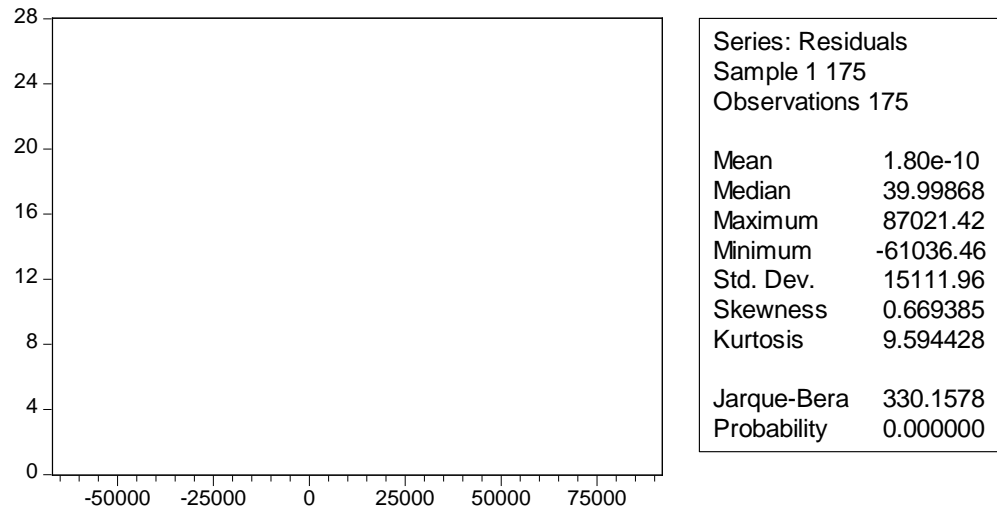
Multikolinieritas adalah suatu keadaan di mana satu atau lebih variabel independen memiliki hubungan linier terhadap variabel independen lainnya. Deteksi awal multikolinieritas dapat dilihat apabila nilai R^2 tinggi, akan tetapi banyak variabel yang tidak signifikan. Dari hasil regresi diperoleh hasil nilai R^2 sebesar 0,98, sedangkan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, jadi tidak terdeteksi adanya multikolinieritas. Lebih lanjut uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat koefisien korelasi antar variabel. Nilai koefisien korelasi tidak ada yang mendekati satu, sehingga dapat dikatakan tidak terdapat adanya multikolinieritas.

4.2.4 Uji normalitas

Salah satu asumsi dalam model linear klasik adalah distribusi probabilitas gangguan μ_1 memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkorelasi, dan mempunyai varians yang konstan. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu memiliki distribusi normal atau tidak.

Untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak, dilakukan uji *Jarque-Bera* (JB Test). Hasil J-B test dapat dilihat pada gambar 4.9 Berikut:

Tabe 4.8 Hasil Uji Normalitas



Dengan $n = 175$ dan $k=38$, maka diperoleh *degree of freedom* (df) sebesar 137. Dengan menggunakan $\alpha = 5$ persen, diperoleh nilai χ^2 tabel sebesar 140,169. Dibandingkan dengan nilai J-B hitung dalam persamaan yaitu 330,1578, maka dapat disimpulkan bahwa probabilitas gangguan $\mu 1$ tidak terdistribusi secara normal.

4.3 Pengujian Statistik Analisis Regresi

4.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen secara statistik.

Tabel 4. 9 Hasil Regresi Model Persamaan Kemiskinan

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
C	599118,7	4,798080	0,0000*
GRW	-3537,125	-2,290567	0,0235*
JP	0,101054	2,053874	0,0419*

AMH	-3255,415	-3,431454	0,0008*
DF	80035,18	2,072044	0,0402*
D1	-107431,8	-7,990695	0,0000*
D2	-110579,1	-5,881402	0,0000*
D3	-112645,9	-2,374473	0,0190*
D4	-161674,2	-3,344169	0,0011*
D5	-66001,54	-2,156386	0,0328*
D6	-224814,9	-4,205062	0,0000*
D7	-149180,1	-2,911663	0,0042*
D8	-228092,7	-6,988165	0,0000*
D9	-241407,7	-5,602870	0,0000*
D10	-174725,8	-5,142520	0,0000*
D11	-272906,8	-5,643798	0,0000*
D12	-192392,8	-4,731011	0,0000*
D13	-267300,4	-5,467504	0,0000*
D14	-229238,4	-4,826259	0,0000*
D15	-106306,7	-4,221314	0,0000*
D16	-243236,6	-5,037817	0,0000*
D17	-190937,9	-3,183503	0,0018*
D18	-204690,0	-6,563274	0,0000*
D19	-287220,7	-5,582724	0,0000*
D20	-297830,3	-8,011233	0,0000*
D21	-163090,0	-4,270175	0,0000*
D22	-273956,9	-6,001319	0,0000*
D23	-247364,0	-4,554049	0,0000*
D24	-218158,0	-4,921809	0,0000*
D25	-262678,1	-4,803891	0,0000*
D26	-219613,6	-4,644004	0,0000*
D27	-134595,3	-5,615933	0,0000*
D28	-190035,3	-9,402895	0,0000*
D29	-282458,9	-3,442879	0,0008*
D30	-265143,9	-4,165319	0,0001*
D31	-287405,8	-3,592754	0,0005*
D32	-388618,4	-13,95006	0,0000*
D33	-301462,8	-4,033084	0,0001*
D34	-299336,3	-3,923869	0,0001*
Jumlah Observasi	175		
R ²	0,982092		
F-statistik	196,2739		
Prob. F-stat	0,0000		

Keterangan: *signifikan pada $\alpha=5\%$

Sumber: Lampiran B

Dari hasil regresi pada tabel 4.9 diperoleh nilai R^2 sebesar 0,982092. Hal tersebut berarti 98 persen variasi jumlah penduduk miskin, dapat dijelaskan oleh variasi 38 variabel independennya secara bersama-sama, yaitu pertumbuhan ekonomi (GRW), jumlah penduduk (JP), pendidikan (AMH), desentralisasi fiskal (DF), dan 34 variabel dummy. Sedangkan sisanya 2 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.3.2 Pengujian Koefisien Regresi secara Serentak (uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen (secara bersama-sama) terhadap variabel dependen secara statistik. Dari uji F dapat diketahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau tidak terhadap variabel dependen. Dari tabel 4.9 Diperoleh nilai probabilitas F-statistic adalah 0,000000, jika dibandingkan dengan nilai alpha ($\alpha=5\%$), aka dapat disimpulkan bahwa secara statistik, variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

4.3.3 Pengujian Koefisien Regresi Secara Individual (Uji t)

Uji t dilakukan untuk melihat besarnya pengaruh dari tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen, secara statistik. Dalam persamaan regresi kemiskinan ini digunakan $\alpha=5\%$. Berdasarkan data pada tabel 4. 9 terbukti bahwa semua variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 34 variabel dummy signifikan artinya bahwa terdapat perbedaan

karakteristik dan sumber daya antar wilayah. Nilai koefisien dummy menunjukkan besarnya perbedaan antar wilayah secara statistik.

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

Berikut hasil uji hipotesis pertama sampai hipotesis keempat:

1. Pengujian Hipotesis Pertama

$H_0 : \beta_1 \geq 0$ Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan

$H_1 : \beta_1 < 0$ Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi (GRW) mempunyai tanda negatif dan besarnya adalah 3537,125, nilai t hitung variabel pertumbuhan ekonomi adalah 2,290567 dengan nilai probabilitas 0,0235. Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$, maka diperoleh t tabel sebesar 1,980, maka t hitung lebih besar dari t tabel, yaitu $2,290567 > 1,980$, serta nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, atau hipotesis pertama diterima. Nilai koefisien sebesar 3537,125 menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen

akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 3.537 jiwa, *ceteris paribus*.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

$H_0 : \beta_3 \leq 0$ Jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan

$H_1 : \beta_3 > 0$ Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa koefisien regresi variabel jumlah penduduk (JP) mempunyai tanda positif dan besarnya adalah 0,101054, sedangkan nilai t hitungnya adalah 2,053874 dengan nilai probabilitas 0,0419. Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ diperoleh t tabel sebesar 1,980, maka t hitung lebih besar dari t tabel, yaitu $2,053874 > 1,980$, serta nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05. Variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, atau hipotesis kedua diterima. Nilai koefisien variabel JP sebesar 0,101054 berarti bahwa setiap peningkatan jumlah penduduk sebesar 1.000 orang akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 101 jiwa, *ceteris paribus*.

3. Pengujian Hipotesis ketiga

$H_0 : \beta_4 \geq 0$ Pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan

$H_1 : \beta_4 < 0$ Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan

Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui bahwa koefisien regresi variabel pendidikan (AMH) mempunyai tanda negatif dan besarnya 3255,415, sedangkan nilai t hitungnya adalah 3,431454 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0008. Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai t tabel sebesar 1,980, maka t hitung lebih besar daripada t tabel, yaitu $3,431454 > 1,980$, serta nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Variabel pendidikan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, atau hipotesis ketiga diterima. Nilai koefisien regresi variabel AMH sebesar 3255,415 berarti bahwa peningkatan pendidikan sebesar 1 persen akan mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 3.255 jiwa, *ceteris paribus*.

4. Pengujian Hipotesis Keempat

$H_0 : \beta_5 \geq 0$ Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan

$H_1 : \beta_5 < 0$ Desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel desentralisasi fiskal (DF) adalah 80035,18, sedangkan nilai t hitungnya adalah 2,072044 dengan nilai probabilitas 0,0402. Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai t tabel sebesar 1,980, maka t hitung lebih besar dari t tabel ($2,072044 > 1,980$) serta nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05. Variabel desentralisasi fiskal memiliki tanda positif, hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori dimana seharusnya desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sehingga hipotesis keempat ditolak. Nilai koefisien regresi sebesar 80035,18 menunjukkan bahwa peningkatan derajat desentralisasi fiskal sebanyak 1 persen akan meningkatkan kemiskinan sebanyak 800,35 jiwa, *ceteris paribus*.

4.4 Interpretasi Hasil

Model regresi kemiskinan mampu dioperasikan karena memenuhi asumsi klasik, yaitu BLUE (*Best Linear Unbiased Estimate*). Nilai koefisien regresi sangat tinggi (0,98) menunjukkan kemampuan variasi variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Secara statistik, variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, AMH, dan desentralisasi fiskal secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa semua variable independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan menggunakan $\alpha = 5\%$. Semua variable memiliki tanda yang sesuai dengan teori kecuali variable desentralisasi fiskal yang tidak sesuai dengan teori. Semua variabel dummy berpengaruh signifikan, artinya bahwa memang terdapat perbedaan karakteristik dan sumber daya antar wilayah.

Kemiskinan dalam penelitian ini diukur dengan banyaknya jumlah penduduk miskin menurut kriteria BPS. BPS menggunakan pendekatan pengeluaran atau konsumsi yang mendasarkan pada kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka usaha untuk menurunkan angka kemiskinan dapat ditempuh dengan meningkatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga daya beli masyarakat dapat meningkat.

Dari hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008), Agrawal (2008) dan Hadi Sasana (2009). Hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan sesuai dengan harapan adanya efek menetes ke bawah (*trickle down effect*), dimana pertumbuhan ekonomi diyakini mampu mengatasi masalah-masalah pembangunan antara lain masalah kemiskinan. Pertumbuhan

ekonomi menunjukkan peningkatan output secara nasional, output akan meningkat apabila faktor-faktor produksi pembentuknya juga mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Salah satu faktor produksi yang dibutuhkan dalam meningkatkan output yaitu tenaga kerja. Peningkatan produksi berarti menunjukkan peningkatan produktivitas, peningkatan produktivitas berarti pendapatan tenaga kerjapun meningkat. Meningkatnya pendapatan akan meningkatkan daya beli tenaga kerja sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhannya.

Dari hasil pengujian hipotetis kedua diperoleh hasil bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan angka kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008) dan Wongdesmiwati (2010). Adanya hubungan positif antara jumlah penduduk dengan jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah penduduk, maka jumlah penduduk miskin juga akan meningkat. Hal tersebut sesuai dengan pemikiran Malthus dimana ia meyakini jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan maka suatu saat nanti sumber daya alam akan habis, dan menyebabkan semakin parahnya kemiskinan. selain itu, menurut Sadono Sukirno (1997) jumlah penduduk yang besar akan mengakibatkan banyaknya pengangguran dan menurunnya produktivitas.

Dari hasil pengujian hipotesis ketiga diperoleh hasil bahwa variabel pendidikan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Skira (2006), Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008) dan Wongdesmiwati (2010). Dalam teori lingkaran kemiskinan Nurkse dikatakan bahwa adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan (Mudrajat Kuncoro, 1997). Pendidikan disini disebut sebagai solusi untuk memotong lingkaran kemiskinan ini. Dengan bekal pendidikan, maka produktivitas akan meningkat, peningkatan produktivitas akan meningkatkan pendapatan, peningkatan pendapatan mempertinggi kemampuan untuk menabung, tabungan tinggi akan meningkatkan investasi dan investasi yang cukup akan dijadikan modal kembali dalam proses pembangunan ekonomi.

Dari hasil pengujian hipotesis keempat diperoleh hasil bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya semakin besar derajat desentralisasi di suatu wilayah akan meningkatkan kemiskinan di wilayah tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Skira (2006) dan Hadi Sasana (2009). Dalam penelitian ini derajat desentralisasi fiskal diukur dengan rasio antara

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah pendapatan bagi hasil pajak dan non pajak terhadap total pengeluaran. Berdasarkan pengertian tersebut kenaikan derajat desentralisasi fiskal yang diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk miskin dapat terjadi apabila peningkatan pengeluaran pemerintah yang dilakukan bukanlah pengeluaran yang bersifat *pro-poor* sehingga tidak berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Model regresi kemiskinan memenuhi asumsi klasik dan dapat menghasilkan estimasi yang bersifat BLUE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 98,2092. Secara parsial seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kemiskinan.
3. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.
4. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan mengurangi kemiskinan.

5. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal di suatu wilayah maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah periode waktu yang digunakan hanya lima tahun, akan lebih baik jika series waktunya lebih lama lagi sehingga dapat lebih menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Penggunaan *Fixed Effect Model* (FEM) memiliki beberapa kelemahan antara lain yaitu masalah modifikasi asumsi *error term*, karena merupakan *error cross section* dan *time series*.

5.3 Saran

Sesuai dengan hasil penelitian yang didapat, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi akan selalu menjadi landasan untuk pengentasan kemiskinan, oleh karena itu perlu terus diupayakan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan bermanfaat bagi penduduk miskin. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi penduduk miskin misalnya dengan program-program padat karya yang melibatkan penduduk miskin sehingga mereka dapat bekerja dan

mempunyai penghasilan. Kemudahan akses kredit terutama bagi pengusaha UMKM sehingga memperlancar usahanya.

2. Pengendalian jumlah penduduk, misalnya dengan terus menggalakkan program Keluarga Berencana (KB). Di Jawa Tengah sendiri tahun 2008 tercatat peserta KB aktif sebanyak 4,96 juta. Perlu terus dilakukannya penyuluhan-penyuluhan akan pentingnya KB serta produk KB yang dapat dijangkau kaum miskin.
3. Peningkatan kualitas pendidikan, misalnya dengan adanya kebijakan anggaran pendidikan 20% perlu dilakukan kontrol dalam pengalokasiannya, terutama agar biaya pendidikan dapat lebih ringan, karena biaya pendidikan kini semakin mahal sehingga kaum miskin susah mengakses pendidikan.
4. Peningkatan pendapatan daerah, terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana bagi hasil pajak dan non pajak dan dialokasikan pada pengeluaran-pengeluaran yang bersifat pro-poor sehingga pengeluaran pemerintah daerah dapat lebih efektif untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

DAFTAR PUSTAKA

_____, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, 2004, Arkola, Surabaya.

Agrawal, Pradeep. 2005, *Economic Growth and Poverty Reduction: Evidence From Kazakhstan*, Asian Development Review, vol. 24, no.2, pp. 90-115.
Available: <http://www.adb.org>

Badan Pusat Statistik, *Data dan Informasi Kemiskinan* berbagai tahun, Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, *Jawa Tengah Dalam Angka 2005-2009*, Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Semarang.

Badan Pusat Statistik, *PDRB Jawa Tengah 2004-2008*, Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Semarang.

Boex et al, 2005, *Fighting Poverty Through Fiskal Decentralization*, Washington,D.C, USAID.

Firmansyah, 2006, *Modul Panel Data Regression: Aplikasi Dengan Eviews 4.0*, Tidak Dipublikasikan.

Gujarati, Damodar N, 2003, *Basic Econometrics Fourth Edition*, The McGraw Hill Companies Inc, New York.

Lincoln Arsyad, 1997, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta.

Mudrajad Kuncoro, 1997, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPPAMP YKPN, Yogyakarta.

Mankiew, Gregory, 2000, *Teori Makro Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.

Hadi Sasana, *Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.10, No.1, h.103-124.

Harminto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2008, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*, Available <http://deptan.go.id>.

Skira, Meghan, 2006, *Fiskal Decentralization and Poverty*. Available:<http://www.aysps.gbu.edu>.

Sadono Sukirno, 1997, *Ekonomi Pembangunan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Todaro, Michael P, 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.

Tulus Tambunan, 2001, *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*, Ghalia Jakarta.

Wongdesmiwati, 2010, *Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, available: <http://www.wordpress.com>.

World Bank, 2006, *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, available: <http://www.worldbank.org>.

No	Kab/Kota	Tahun	KM	GRW	JP	AMH	DF
----	----------	-------	----	-----	----	-----	----

LAMPIRAN

A

1.	Kab. Cilacap	2004	346200	4,54	1641849	88,35	0,18
		2005	361000	4,93	1654971	88,45	0,20
		2006	402100	5,33	1674210	88,8	0,17
		2007	363600	4,72	1621664	89,05	0,14
		2008	343900	4,87	1623176	90,1	0,08
2.	Kab. Banyumas	2004	325200	3,71	1501370	91,5	0,17
		2005	326800	4,17	1514105	92,05	0,19
		2006	362200	3,2	1531737	92,3	0,18
		2007	333000	4,48	1490665	93,3	0,11
		2008	340700	5,29	1495981	93,9	0,17
3.	Kab. Purbalingga	2004	266500	3,16	846924	89,75	0,13
		2005	250600	3,34	854924	90,4	0,18
		2006	362900	4,18	863478	90,75	0,15
		2007	246300	5,06	816720	91,15	0,10
		2008	221900	6,19	821870	93	0,06
4.	Kab. Banjarnegara	2004	240300	2,96	884353	85	0,14
		2005	239500	3,81	891964	86,85	0,16
		2006	251300	3,95	903919	87,15	0,14
		2007	232900	4,35	559668	88,1	0,13
		2008	200600	5,01	864148	88,2	0,06
5.	Kab. Kebumen	2004	371500	2,93	1193850	88,95	0,11
		2005	349300	1,18	1200724	89,4	0,13
		2006	388700	3,2	1208486	89,75	0,20
		2007	362400	4,08	1203230	90,1	0,07
		2008	334900	4,52	1208716	90,4	0,11
6.	Kab. Purworejo	2004	167100	3,64	709397	86,4	0,13
		2005	157100	4,17	709878	87,85	0,14
		2006	162300	4,85	712003	88,2	0,13
		2007	146000	5,23	717439	88,35	0,08
		2008	130000	6,08	719396	89,2	0,13
7.	Kab. Wonosobo	2004	254700	2,28	759018	84,95	0,12
		2005	239400	2,34	769138	87,45	0,13
		2006	257500	3,19	779919	87,8	0,13
		2007	241400	3,23	752136	88,3	0,07
		2008	207500	3,58	754447	88,9	0,06
8.	Kab. Magelang	2004	185800	4,01	1142467	89,4	0,16
		2005	174700	4,03	1154862	89,55	0,18
		2006	199100	4,62	1169638	89,9	0,15

		2007	200100	4,91	1153234	90,3	0,10
		2008	190800	5,21	1161278	91,3	0,14
9.	Kab. Boyolali	2004	172300	4,86	925722	84,3	0,14
		2005	162000	3,42	931950	85,1	0,17
		2006	184600	4,08	941624	85,65	0,16
		2007	167000	4,19	928164	86,6	0,09
		2008	158400	4,08	932698	86	0,06
10.	Kab. Klaten	2004	263900	4,94	1120400	82,45	0,11
		2005	248100	4,86	1127747	83	0,11
		2006	257400	4,59	1139218	83,35	0,09
		2007	249100	2,3	1126165	89,35	0,05
		2008	243100	3,31	1128852	89,3	0,05
11.	Kab. Sukoharjo	2004	118100	3,97	807635	87,6	0,14
		2005	116000	4,33	820685	88,4	0,18
		2006	126500	4,11	838149	88,9	0,16
		2007	113800	4,53	813657	90,2	0,12
		2008	99100	5,11	819621	90,4	0,11
12.	Kab. Wonogiri	2004	246100	2,53	1004722	78,75	0,11
		2005	246800	4,1	1007435	80,1	0,12
		2006	262900	4,31	1010456	80,35	0,12
		2007	237400	4,07	978808	81,4	0,09
		2008	201100	5,07	980132	82	0,05
13.	Kab. Karanganyar	2004	132600	5,63	811877	81,1	0,15
		2005	130400	5,98	820432	82,05	0,15
		2006	148600	5,49	834265	82,5	0,14
		2007	138900	5,08	799595	84,25	0,10
		2008	125900	5,74	805462	84,8	0,14
14.	Kab. Sragen	2004	225100	3,63	859986	72,9	0,16
		2005	204200	4,93	863046	75,2	0,16
		2006	201900	5,16	868036	76,45	0,13
		2007	180700	5,18	856296	81,25	0,14
		2008	177100	5,73	857844	81,2	0,05
15.	Kab. Grobogan	2004	385100	2,2	1299175	84,95	0,14
		2005	362100	3,78	1314280	85,15	0,15
		2006	361900	4,74	1334380	85,35	0,14
		2007	330400	4	1318286	88,35	0,15
		2008	262000	4,37	1326414	90,2	0,07
16.	Kab. Blora	2004	191200	3,28	826702	77,75	0,15

		2005	177100	3,75	832723	78,75	0,20
		2006	197600	4,07	840729	78,95	0,21
		2007	176800	3,85	829745	81,5	0,09
		2008	155100	3,95	831909	83	0,18
17.	Kab. Rembang	2004	186300	3,01	576417	86,9	0,13
		2005	175100	4,53	582111	87,65	0,18
		2006	188500	3,56	588320	88,85	0,16
		2007	174300	5,53	570870	89,4	0,08
		2008	154700	3,81	572879	88,8	0,15
18.	Kab. Pati	2004	247900	-2,12	1187646	85,8	0,18
		2005	233000	4,25	1197856	86,3	0,18
		2006	256500	3,94	1213664	86,8	0,17
		2007	228800	4,45	1165159	87,2	0,14
		2008	207200	5,19	1167621	86,3	0,14
19.	Kab. Kudus	2004	85500	5,56	738410	89,95	0,22
		2005	80400	8,7	745584	90,5	0,18
		2006	91600	4,4	759267	91	0,20
		2007	82400	2,48	764563	92,15	0,09
		2008	97800	3,23	774838	92	0,12
20.	Kab. Jepara	2004	104000	3,76	1034799	86,65	0,18
		2005	108500	4	1053116	89,5	0,19
		2006	123600	4,23	1077586	90,15	0,17
		2007	111200	4,19	1058064	92,6	0,16
		2008	119200	4,74	1073631	92,9	0,17
21.	Kab. Demak	2004	260600	2,83	1024934	87,75	0,11
		2005	245000	3,4	1044978	88	0,12
		2006	263500	3,86	1071487	88,65	0,12
		2007	238900	4,02	1017884	90,8	0,06
		2008	217200	4,15	1025388	90,8	0,06
22.	Kab. Semarang	2004	121300	3,75	879785	90,55	0,18
		2005	114000	1,46	855500	92,65	0,21
		2006	120700	3,11	894018	93,6	0,16
		2007	110100	3,81	890898	94,05	0,12
		2008	102500	4,72	900420	93,5	0,17
23.	Kab. Temanggung	2004	107200	3,37	694892	92,25	0,12
		2005	100800	3,92	704820	94,55	0,17
		2006	114900	3,99	717486	95,25	0,12
		2007	115000	3,31	694949	95,7	0,12

		2008	114700	4,03	700845	95,9	0,05
24.	Kab. Kendal	2004	185500	2,85	882145	88,1	0,14
		2005	174400	2,61	887091	88,5	0,17
		2006	198700	2,63	897560	88,95	0,17
		2007	192700	3,66	925620	89,7	0,13
		2008	168200	4,28	938115	88,9	0,14
25.	Kab. Batang	2004	133300	2,55	692519	82,95	0,13
		2005	125300	2,07	701277	83,7	0,14
		2006	134400	2,8	712542	84,15	0,14
		2007	139800	2,51	676152	86,35	0,12
		2008	122000	3,49	678909	87,6	0,13
26.	Kab. Pekalongan	2004	181100	3,66	829984	85,8	0,14
		2005	170300	4,39	842122	86,95	0,14
		2006	190000	3,98	858650	87,15	0,12
		2007	170000	4,21	837906	87,85	0,08
		2008	164300	4,59	844228	89,9	0,15
27.	Kab. Pemasang	2004	299100	3,35	1316977	85,1	0,12
		2005	300200	3,84	1339112	86,9	0,17
		2006	338200	4,05	1371943	87,25	0,15
		2007	307100	3,72	1344597	87,55	0,09
		2008	325200	4,47	1358952	87,3	0,07
28.	Kab. Tegal	2004	297200	5,54	1429345	82,35	0,20
		2005	279400	5,29	1446284	82,8	0,16
		2006	289700	4,72	1471043	83,4	0,14
		2007	258600	5,19	1406796	88,55	0,09
		2008	220700	5,51	1410290	89,1	0,11
29.	Kab. Brebes	2004	519600	4,86	1763581	79,55	0,12
		2005	488600	4,83	1784094	84,85	0,15
		2006	533100	4,8	1814274	85,5	0,15
		2007	492200	4,71	1765564	86,45	0,13
		2008	459300	4,79	1775939	84,9	0,13
30.	Kota Magelang	2004	17400	3,74	119400	94,55	0,20
		2005	16400	3,71	123576	96,1	0,24
		2006	14500	4,33	130732	96,5	0,21
		2007	13000	2,44	125952	97,3	0,12
		2008	14900	5,17	132177	97,2	0,05
31.	Kota Surakarta	2004	69500	6,11	485501	95,65	0,29
		2005	69100	5,8	505153	94,95	0,30

		2006	77600	5,15	534540	95,05	0,25
		2007	69800	5,43	512898	95,45	0,15
		2008	83400	5,82	517557	96,7	0,22
32.	Kota Salatiga	2004	16000	4,25	158112	95,15	0,20
		2005	15000	4,24	164979	96,55	0,25
		2006	15200	4,15	175967	96,65	0,21
		2007	15600	4,17	171248	96,7	0,15
		2008	14900	5,39	174699	96,5	0,18
33.	Kota Semarang	2004	79000	4,04	1389416	94,65	0,53
		2005	58700	4,12	1406233	96,1	0,59
		2006	77800	5,14	1435800	96,25	0,54
		2007	77600	5,71	1468292	97,05	0,37
		2008	28000	5,98	1488645	95,9	0,38
34.	Kota Pekalongan	2004	18600	3,86	271418	92,65	0,17
		2005	17500	4,07	273633	93,25	0,18
		2006	19900	3,82	284112	93,35	0,15
		2007	17900	3,06	271808	95,15	0,08
		2008	26800	3,8	273342	95,4	0,14
35.	Kota Tegal	2004	23100	5,82	242112	90,45	0,24
		2005	21700	5,85	240784	90,7	0,28
		2006	24700	4,87	249612	90,8	0,24
		2007	22200	5,15	239038	94,75	0,19
		2008	26800	5,21	239860	94,9	0,24

LAMPIRAN

B

Hasil Regresi Utama

Dependent Variable: KM

Method: Least Squares

Date: 10/05/10 Time: 11:49

Sample: 1 175

Included observations: 175

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	599118.7	124866.4	4.798080	0.0000
GRW	-3537.125	1544.214	-2.290567	0.0235
JP	0.101054	0.049202	2.053874	0.0419
AMH	-3255.415	948.6983	-3.431454	0.0008
DF	80035.18	38626.20	2.072044	0.0402
D1	-107431.8	13444.61	-7.990695	0.0000
D2	-110579.1	18801.49	-5.881402	0.0000
D3	-112645.9	47440.37	-2.374473	0.0190
D4	-161674.2	48345.09	-3.344169	0.0011
D5	-66001.54	30607.48	-2.156386	0.0328
D6	-224814.9	53462.91	-4.205062	0.0000
D7	-149180.1	51235.36	-2.911663	0.0042
D8	-228092.7	32639.85	-6.988165	0.0000
D9	-241407.7	43086.44	-5.602870	0.0000
D10	-174725.8	33976.69	-5.142520	0.0000
D11	-272906.8	48355.16	-5.643798	0.0000
D12	-192392.8	40666.32	-4.731011	0.0000
D13	-267300.4	48888.92	-5.467504	0.0000
D14	-229238.4	47498.16	-4.826259	0.0000
D15	-106306.7	25183.32	-4.221314	0.0000
D16	-243236.6	48282.14	-5.037817	0.0000
D17	-190937.9	59977.29	-3.183503	0.0018
D18	-204690.0	31187.18	-6.563274	0.0000
D19	-287220.7	51448.12	-5.582724	0.0000
D20	-297830.3	37176.58	-8.011233	0.0000
D21	-163090.0	38192.82	-4.270175	0.0000
D22	-273956.9	45649.44	-6.001319	0.0000
D23	-247364.0	54317.38	-4.554049	0.0000
D24	-218158.0	44324.75	-4.921809	0.0000
D25	-262678.1	54680.28	-4.803891	0.0000
D26	-219613.6	47289.70	-4.644004	0.0000
D27	-134595.3	23966.68	-5.615933	0.0000
D28	-190035.3	20210.30	-9.402895	0.0000
D30	-282458.9	82041.49	-3.442879	0.0008
D31	-265143.9	63655.12	-4.165319	0.0001
D32	-287405.8	79995.95	-3.592754	0.0005

D33	-388618.4	27857.84	-13.95006	0.0000
D34	-301462.8	74747.45	-4.033084	0.0001
D35	-299336.3	76286.00	-3.923869	0.0001

R-squared	0.982092	Mean dependent var	189656.6
Adjusted R-squared	0.977088	S.D. dependent var	112927.1
S.E. of regression	17093.30	Akaike info criterion	22.52434
Sum squared resid	3.97E+10	Schwarz criterion	23.22964
Log likelihood	-1931.880	Hannan-Quinn criter.	22.81043
F-statistic	196.2739	Durbin-Watson stat	2.169782
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN

C

Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	24.85292	Prob. F(6,130)	0.0000
Obs*R-squared	93.49311	Prob. Chi-Square(6)	0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 10/09/10 Time: 18:58

Sample: 1 175

Included observations: 175

Presample missing value lagged residuals set to zero.

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	55190.80	95408.76	0.578467	0.5639
GRW	2794.716	1144.888	2.441040	0.0160
JP	-0.027368	0.041678	-0.656651	0.5126
AMH	-184.8989	712.7188	-0.259428	0.7957
DF	-20915.61	29679.64	-0.704712	0.4822
D1	-11208.82	10451.68	-1.072441	0.2855
D2	-11969.16	15509.46	-0.771733	0.4417
D3	-7143.365	40831.10	-0.174949	0.8614
D4	-29469.63	41091.65	-0.717168	0.4746
D5	-5942.885	26143.84	-0.227315	0.8205
D6	-27161.12	45843.75	-0.592472	0.5546
D7	-26003.06	43812.75	-0.593504	0.5539
D8	-35388.08	28063.60	-1.260995	0.2096
D9	-12883.10	36845.34	-0.349653	0.7272
D10	-19225.52	28964.91	-0.663752	0.5080
D11	-22667.94	41418.48	-0.547291	0.5851
D12	-14778.23	34044.00	-0.434092	0.6649
D13	-42633.19	41423.63	-1.029200	0.3053
D14	-21455.21	39795.02	-0.539143	0.5907
D15	26687.02	21370.18	1.248797	0.2140
D16	-57636.73	40172.32	-1.434737	0.1538
D17	-31899.33	51623.66	-0.617921	0.5377
D18	-15267.84	26156.30	-0.583715	0.5604
D19	-34007.01	44239.01	-0.768711	0.4435
D20	-31267.59	31975.10	-0.977873	0.3300
D21	4357.259	32880.57	0.132518	0.8948
D22	-25138.53	38836.75	-0.647287	0.5186
D23	-40619.74	47105.45	-0.862315	0.3901
D24	-5904.522	37911.71	-0.155744	0.8765

D25	-33852.00	46185.79	-0.732953	0.4649
D26	-17395.63	40511.05	-0.429405	0.6683
D27	-26086.96	20253.45	-1.288025	0.2000
D28	19105.22	17074.52	1.118931	0.2652
D30	-65617.44	70624.48	-0.929103	0.3546
D31	-36519.80	54918.98	-0.664976	0.5072
D32	-36151.03	68568.76	-0.527223	0.5989
D33	9401.837	21291.70	0.441573	0.6595
D34	-48297.81	63951.32	-0.755228	0.4515
D35	-47151.80	65366.99	-0.721340	0.4720
RESID(-1)	-0.888531	0.104003	-8.543285	0.0000
RESID(-2)	-1.062732	0.105188	-10.10317	0.0000
RESID(-3)	-0.861495	0.098666	-8.731457	0.0000
RESID(-4)	-0.889241	0.094358	-9.424162	0.0000
RESID(-5)	-0.344145	0.086488	-3.979101	0.0001
RESID(-6)	-0.208327	0.087543	-2.379717	0.0188
<hr/>				
R-squared	0.534246	Mean dependent var	1.80E-10	
Adjusted R-squared	0.376607	S.D. dependent var	15111.96	
S.E. of regression	11931.69	Akaike info criterion	21.82882	
Sum squared resid	1.85E+10	Schwarz criterion	22.64262	
Log likelihood	-1865.021	Hannan-Quinn criter.	22.15892	
F-statistic	3.389034	Durbin-Watson stat	2.413407	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil Uji Heteroskedastitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.510110	Prob. F(38,136)	0.0454
Obs*R-squared	51.92892	Prob. Chi-Square(38)	0.0655
Scaled explained SS	134.7715	Prob. Chi-Square(38)	0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

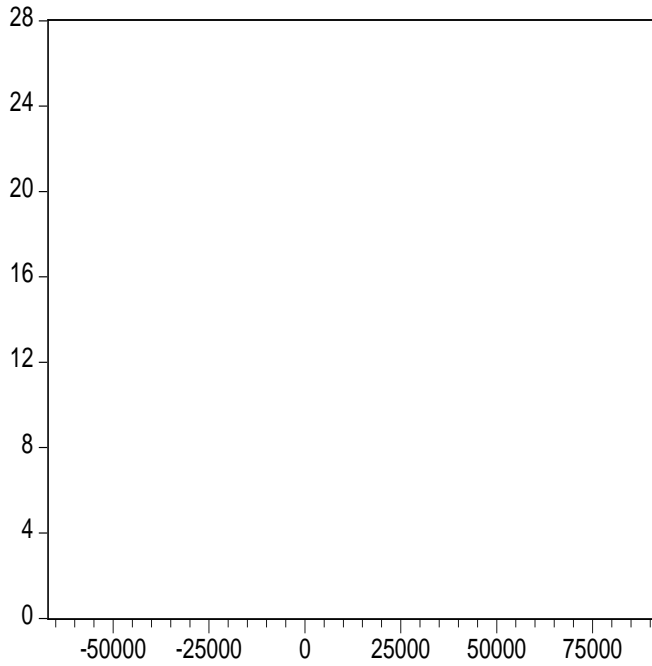
Date: 10/09/10 Time: 18:50

Sample: 1 175

Included observations: 175

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.34E+09	3.74E+09	-1.158601	0.2486
GRW^2	252373.0	7343829.	0.034365	0.9726
JP^2	0.001009	0.001045	0.965987	0.3358
AMH^2	234372.7	191175.2	1.225958	0.2223
DF^2	-5.51E+08	2.91E+09	-0.189605	0.8499
D1^2	1.50E+08	6.37E+08	0.234938	0.8146
D2^2	2.40E+08	1.03E+09	0.233049	0.8161
D3^2	3.62E+09	2.59E+09	1.398918	0.1641
D4^2	2.21E+09	2.62E+09	0.845698	0.3992
D5^2	1.28E+09	1.84E+09	0.696253	0.4875
D6^2	2.08E+09	2.80E+09	0.743933	0.4582
D7^2	2.12E+09	2.73E+09	0.776445	0.4388
D8^2	1.27E+09	1.94E+09	0.653537	0.5145
D9^2	1.83E+09	2.44E+09	0.751395	0.4537
D10^2	1.38E+09	2.03E+09	0.679277	0.4981
D11^2	1.83E+09	2.63E+09	0.698357	0.4861
D12^2	2.03E+09	2.33E+09	0.869468	0.3861
D13^2	2.13E+09	2.66E+09	0.801231	0.4244
D14^2	2.20E+09	2.60E+09	0.844889	0.3997
D15^2	1.92E+09	1.54E+09	1.240823	0.2168
D16^2	2.26E+09	2.63E+09	0.857911	0.3925
D17^2	2.32E+09	2.98E+09	0.779959	0.4368
D18^2	1.35E+09	1.87E+09	0.722535	0.4712
D19^2	1.86E+09	2.72E+09	0.681690	0.4966
D20^2	1.48E+09	2.16E+09	0.684901	0.4946
D21^2	1.50E+09	2.22E+09	0.675848	0.5003
D22^2	1.58E+09	2.51E+09	0.629821	0.5299
D23^2	1.86E+09	2.81E+09	0.662767	0.5086
D24^2	1.81E+09	2.47E+09	0.730063	0.4666
D25^2	2.26E+09	2.84E+09	0.796107	0.4274
D26^2	1.87E+09	2.59E+09	0.721146	0.4721
D27^2	1.03E+09	1.47E+09	0.702784	0.4834
D28^2	8.23E+08	1.23E+09	0.669238	0.5045
D30^2	2.23E+09	3.29E+09	0.675920	0.5002
D31^2	2.03E+09	3.02E+09	0.672557	0.5024
D32^2	2.17E+09	3.27E+09	0.661645	0.5093
D33^2	5.97E+08	1.32E+09	0.452939	0.6513
D34^2	2.22E+09	3.24E+09	0.686950	0.4933
D35^2	2.38E+09	3.23E+09	0.735773	0.4631
R-squared	0.296737	Mean dependent var		2.27E+08
Adjusted R-squared	0.100237	S.D. dependent var		6.68E+08
S.E. of regression	6.33E+08	Akaike info criterion		43.56419
Sum squared resid	5.45E+19	Schwarz criterion		44.26948
Log likelihood	-3772.866	Hannan-Quinn criter.		43.85027
F-statistic	1.510110	Durbin-Watson stat		2.507372
Prob(F-statistic)	0.045422			

HASIL UJI NORMALITAS



Series: Residuals	
Sample 1 175	
Observations 175	
Mean	1.80e-10
Median	39.99868
Maximum	87021.42
Minimum	-61036.46
Std. Dev.	15111.96
Skewness	0.669385
Kurtosis	9.594428
Jarque-Bera	330.1578
Probability	0.000000